`

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Letak Geografis Daerah;

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi

Secara **geografis**, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98º36'-101º53' Bujur Timur dan 0º54' Lintang Utara sampai dengan 3º30' Lintang Selatan, dengan luas daratan ±42.297,30 Km^2dan luas perairan (laut) ±186.580 km^2dengan panjang garis pantai wilayah daratan ± 375 Km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 Km. Perairan laut ini memiliki 375 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) yang mempunyai 179 Kecamatan dengan 1.160 Kelurahan/Nagari, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat

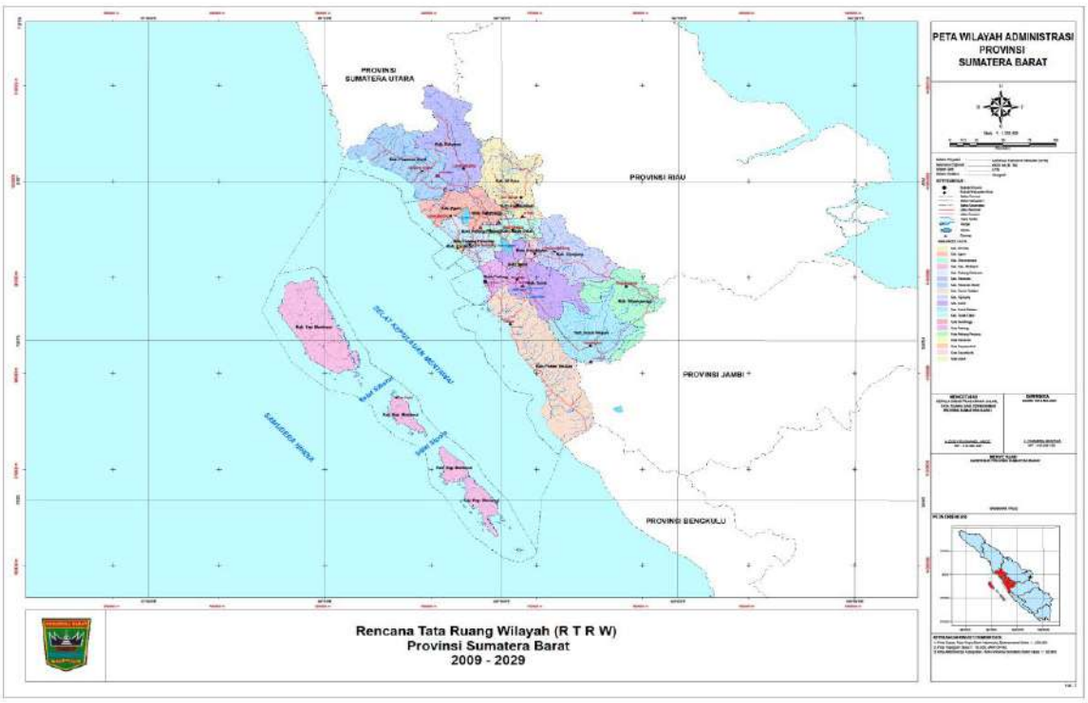

Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara 25,78˚C dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 994,69 mb. Pengaruh letak ini, maka menurut ketinggiannya, wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran

`

rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian >3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30.41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Gambaran karakteristik daerah Kabupaten/Kota se Sumatrera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Karakteristik Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM^2)	KONDISI/KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS
1	Kep. Mentawai	6.011,35	Kabupaten Kep. Mentawai adalah daerah tertinggal yang terletak 82 mil laut di sebelah Barat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau 98, 4 buah pulau besar (Sibeurt, Sipora, Pagai Utara & Pagai Selatan) dan 2 buah pulau terluar (sibaru-baru dan sinyaunyau)	10	43	00^0 5’ LS – $03^{0\,30}$’ LS 97^0 30’ BT – 100^0 30’ BT
2	Pesisir Selatan	5.794,95	Kabupaten Pesisir selatan terletak di Selatan Barat Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Kota bengkulu, topografi memiliki kemiringan lereng antara 0% - >40% dengan pergunungan setinggi 2.000 meter, juga memiliki Garis Pantai sepanjang sekitar 234 Km yang memiliki 74 pulau-pulau kecil	15	182	0^0 59’ LS – 2^0 28’ LS 109^0 19’ BT – 101^0 18’ BT
3	Solok	7.084,02	Kabupaten Solok dibagian dengan Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama Padang Prov. Sumbar dengan Provinsi Jambi (lintas tengah Sumatera) yang mempunyai topografi yang bervariasi berlembah2 dan berbukit2 dengan ketinggian antara 329 mtr dpl sampai dengan 1.458 m dpl, Kabupaten Solok juga memilki 1 buah Gunung Berapi yaitu Gunung talang , serta memiliki beberapa danau (D. Singkarak, D. Diatas, D. Dibawah, D. Talang)	14	74	0^0 31’ LS – 1^0 19’ LS 100^0 27’ BT – 101^0 15’ BT
4	Sijunjung	3.130,80	Kabupaten Sijunjung terletak di bagian timur provinsi sumatera barat dilalui oleh jalur utama antara Prov. Riau dengan Prov. Jambi, topografi Kabupaten sijunjung daerah yang berbukit-bukit pada ketinggian antara 100 - 1.250 m dpl	8	62	0^0 18’ LS – 1^0 42’ LS 100^0 42’ BT – 100^0 52’ BT
5	Tanah Datar	1.336,00	Kabupaten Tanah Datar terletak Bagian tengah arah ke timur Prov. Sumbar yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Pekan Baru Prov. Riau serta jalur2 yang menghubungkan beberapa kabupaten, dengan topografi yang datar, bergelombang, berbukit, dengan	14	75	00^0 17” LS – 03^0 39” LS 100^0 19” BT – 100^0 51” BT

`

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM^2)	KONDISI/KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS
			ketinggian antara 200 m dpl sampai dengan 1.000 mtr dpl, memiliki 3 buah gunung yaitu g. Merapi, G. Singalang, G. Sago, Tanah Datar memiliki Danau yaitu Danau Singkarak.			
6	Padang Pariaman	1.328,79	Kabupaten Padang Pariaman Yang terletak di Bagian Barat tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh 2 jalur utama yaitu Jalur yang menghubungkan antara Pekan Baru Provinsi Riau dengan Padang Provinsi Sumbar dan jalur yang menghubungkan Madina Prov. Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat, Padang Pariaman memiliki 2 buah gunung (gunung tandikek dan Gunung Sago) dengan panjang garis pantai 60,0 km dan memiliki 2 buah Pulau (Pulau Pieh dan Pulau Bando)	17	103	0^0 11" LS – 3^0 30' LS 98^0 36' BT – 101^0 53' BT
7	Agam	2.232,30	Kabupaten Agam pada bagian tengah Sumatera Barat dilalui jalur lintas tengahSumatera dan jalur lintas barat, Agam juga memiliki dua buah gugung (gunung merapi=2.891 mtr) dan (gunung singgalang=2.877 mtr), panjang garis pantai 43 mtr dan 2 buah pulau	16	82	0^0 02" LS – 0^0 23' LS 99^0 52' BT – 100^0 16' BT
8	Lima Puluh Kota	3.354,30	Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di timur bagian utara Provinsi Simatera Barat yang dilalui jalur yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dengan kelerengan antara 0% /1 m - 40% >300 m dan memiliki 3 buah gunung (Gunung Sago = 2.261, Gunung Bungsu=1.253, Gunung Sanggul = 1.495,)	13	79	0^0 22" LS – 0^0 23' LS 100^0 16' BT – 100^0 51' BT
9	Pasaman	3.947,63	Kabupaten Pasaman terletak Paling Utara Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur lintas Medan- Prov. Sumut dengan Padang Prov. Sumbar dengan topografi ketinggian antara 50 m sampai dengan 2.240 meter yang memiliki 5 buah pegunungan (G. Ambun, G, Sigapuak, G. Kalabu, G. Malenggang, G.Tambian)	12	37	$0^0$55" LS – 0^0 06' LS 99^0 45' BT – 100^0 21' BT
10	Solok Selatan	3.346,20	Kabupaten Solok Selatan di bagian tengah paling selatan provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Prov. Sumbar dengan Kerinci Prov. Jambi, Kabupaten ini termasuk daerah tertinggal provinsi Sumatera Barat, yang memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter d pl, dengan yang 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor. Kabupaten Solok Selatan masih merupakan daerah tertinggal.	7	39	0^0 43" LS – 01^0 43' LS 101^0 01' BT – 101^0 30' BT
11	Dharmasraya	2.961,13	Kabupaten Dharmasraya terletak di timur Sumatera Barat yang berjarak sekitar 196 km dari Ibukota Provinsi dan dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Prov. Jambi-Prov. Sumbar Dharmasraya mempunyai topografi yang sebegian besar landai antara 0%-40%.	11	52	0^0 47" LS – 3^0 42' LS 101^0 09' BT – 101^0 54' BT

`

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM^2)	KONDISI/KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS
12	Pasaman Barat	3.877,77	Kabupaten Pasaman Barat terletak di Utara Prov. Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Prov. Sumut yang dilalui oleh Jalur yang menghubungkan Antara Madina Prov. Sumut dengan Padang prov. Sumbar, topografi Pasaman dengan ketinggian antara 0-2.912 m (G. Malintang, G. Talamau). Kabupaten Pasaman Barat masih merupakan daerah tertinggal.	11	19	0^0 30' LS – 0^0 11' LS 99^0 10' BT – 100^0 04' BT
13	Kota Padang	694,96	Kota Padang adalah Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Bagian Barat Prov. Sumatera Barat yang memiki 3 jalur utama arah Selatan ke Bengkulu, Arah Utara Medan dan Pekan Baru, Arah timur menuju Lintas Sumatera bagian tengah, topografi Kota Padang dengan kelerengan 0-40% dengan ketinggian 0 m dpl sampai dengan >1000 m dpl, dengan garis pantai $\pm$ 84 Km dan mempunyai 19 pulau-pulau kecil.	11	104	00^0 44' LS – 01^0 08' LS 100^0 05' BT – 100^0 34' BT
14	Kota Solok	57,64	Kota Solok mempunyai posisi yang strategis karena terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi. Ketinggian Kota Solok berada pada 390 m dpl dengan kelerengan 0 - > 45%.	2	13	0^0 32' LS – 0^0 42' LS 100^0 32' BT – 101^0 41' BT
15	Kota Sawahlunto	273,45	Kota Sawahlunto yang merupakan Kota Tambang dengan cadangan batubara sebanyak 73 juta ton dan terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur antar kabupaten – kota di Sumatera Barat. Ketinggian Kota Sawahlunto berada pada 250 – 650 M dpl, kemiringan 0 - > 40%.	4	37	0^0 33' LS – 0^0 43' LS 100^0 43' BT – 100^0 50' BT
16	Kota Padang Panjang	23,00	Kota Padang Panjang terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama menuju Padang – Pekanbaru dan jalur lainnya yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat. Topografi Kota Padang Panjang memiliki kemiringan lereng 0 – 40% dengan ketinggian berkisar antara 550 m dpl – 900 m dpl.	2	16	0^0 27' LS – 0^0 30' LS 100^0 20' BT – 100^0 27' BT
17	Kota Bukittinggi	25,239	Kota Bukittinggi terletak dibagian tengah Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis diantaranya Padang ke Medan, Padang Pekan Baru, serta persimpangan antar kabupaten, Kota Bukittinggi mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai dengan 8% dengan ketinggian 756 - 960 m dpl.	3	24	01^0 16' LS – 00^0 19' LS 100^0 21' BT – 100^0 25' BT
18	Kota Payakumbuh	80,43	Kota Payakumbuh berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah strategis jalur utama Padang (Provinsi Sumbar) – Pekanbaru (Prov. Riau). Letak Kota Payakumbuh berada di utara gunung api podam (G. Malintang) pada ketinggian 500m dpl, dengan kemiringan 0 - > 40%.	5	48	00^0 10' LS – 0^0 17' LS 100^0 35' BT – 100^0 45' BT

`

NO	NAMA KAB/ KOTA	LUAS (KM^2)	KONDISI/KAWASAN	JUMLAH KECAMATAN	NAGARI/ DESA/ KELURAHAN	GEOGRAFIS
19	Kota Pariaman	73,54	Kota Pariaman terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis antara Padang – Madina Sumut, dengan kemiringan antar 0 – 40% dan ketinggian 2 – 35 m dpl. Kota Pariaman memiliki 6 buah pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 12,7 Km.	4	71	0^0 33' LU – 0^0 04' LS 100^0 04' BT – 100^0 10' BT

Sumber data: Sumatera Barat Dalam Angka

2.1.1.3 Topografi

Topografi daerah Sumatera Barat yang didominasi oleh perbukitan mengakibatkan sebagian besar kawasan hutan di Sumatera Barat berstatus kawasan lindung, baik fungsi hutan lindung maupun hutan konservasi. Topografi wilayah yang 39,08% lahannya berada pada kemiringan lebih dari 40% dan geomorfologi yang berada pada pertemuan 2 (dua) lempengan yakni Euroasia dan Australia serta patahan Semangka, membutuhkan hutan untuk menjaga kestabilan lahan. Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggiintensitas penggunaan lahannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk pemanfaatan lahan secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan.Sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungantermasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungantersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Provinsi Sumatera Barat menjadi gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau, dan pelabuhan laut internasional Teluk Bayur. Selain itu secara geologis Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai Great Sumatra Fault di sepanjang pesisir barat Sumatera dan Mentawai Fault di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat yang luas termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk permukiman maupun industri. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk

`

pengembangan perekonomian, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.

2.1.1.4 Geologi

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng *Indo-Australia* di bagian selatan dan lempeng *Euroasia* di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate.* Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi. Gambar 2.2 memperlihatkan peta geologi Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.2
Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat

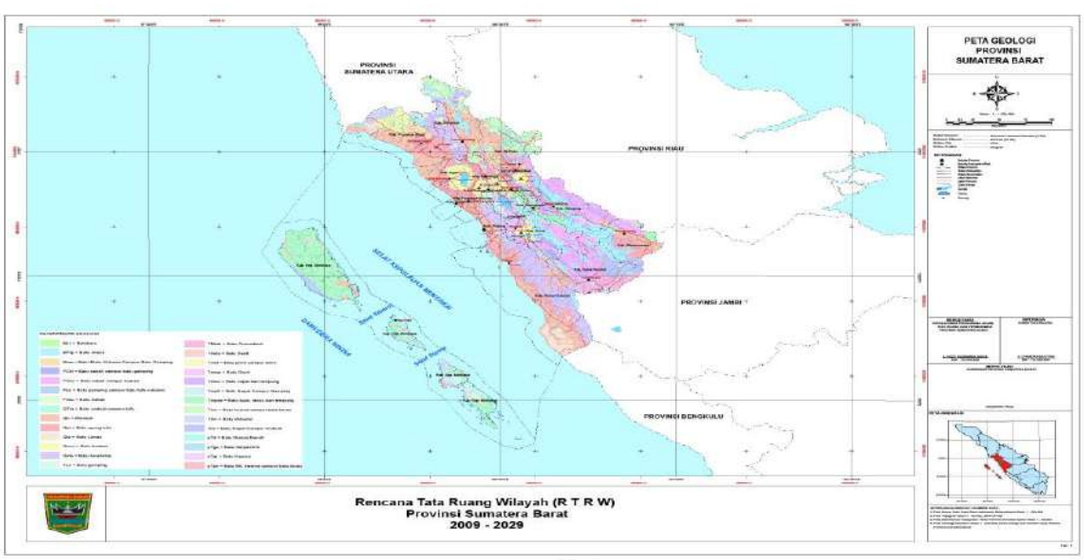

`

Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Jumlah sungai di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km^2, Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km2, sedangkan Danau Diatas (3.150 km^2), Danau Dibawah (1.400 km^2), dan Danau Talang (1,02 km^2) terdapat di Kabupaten Solok

2.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu di Sumatera Barat tercatat antara 18^0 – 34^0 C dengan suhu rata-rata lebih kurang $25,5^0$C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5^0 – 7^0 C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4^0 – 6^0 C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar,

`

Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% – 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan manifestasi dari kegiatan sosial-budaya dan sosial-ekonomi dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Secara keseluruhan luas lahan terbangun di Provinsi Sumatera Barat direncanakan seluas 70.328 Ha, sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan (termasuk pesisir).

Selanjutnya untuk **kawasan pertanian**, potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Potensi luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2015 seluas 2.830.235 Ha. Dari potensi tersebut 70,34% dimanfaatkan dan sisanya 29,66% belum dimanfaaatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersedia lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing dan memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh.Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Sedangkan untuk **kawasan hutan** berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 35/Kpts-II/2013, luas kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat 4.229.730 Ha dengan rincian:Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas ± 769.774,66 Ha, Hutan Lindung (HL) ± 791.671,00 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 233.210,58 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 360.608,00 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 187,629.00 Ha, seperti pada Tabel 2.2.

`

Tabel 2.2
Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat

NO.	KABUPATEN / KOTA *Regency/City*	FUNGSI HUTAN/*Function of Forest*						JUMLAH/ *Amount*
		Hutan Lindung	KSA/KPA	HPT	HP	HPK	APL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Kab. Agam	22.679,11	26.513,66	7.696,34	3.133,52	8.449,83	154.757,54	223.230,00
2	Kab. Dharmasraya	11.935,30	5.967,08	31.100,58	26.591,73	16.795,40	203.722,91	296.113,00
3	Kab. Kepulauan Mentawai	7.712,06	183.396,94	-	247.186,38	54.956,37	107.883,25	601.135,00
4	Kab. Lima Puluh Kota	124.040,96	20.598,48	19.504,94	5.287,18	11.371,04	154.627,39	335.430,00
5	Kab. Padang Pariaman	15.624,54	16.118,20	-	-	-	101.136,25	132.879,00
6	Kab. Pasaman	200.539,68	32.732,17	26.801,27	-	8.614,86	176.075,02	444.763,00
7	Kab. Pasaman Barat	72.070,74	59,46	5.041,84	18.838,68	6.986,93	235.779,35	338.777,00
8	Kab. Pesisir Selatan	23.905,73	285.420,14	46.274,19	4.563,14	30.974,06	188.357,73	579.495,00
9	Kab. Sijunjung	78.663,69	40.048,87	29.923,48	21.916,46	15.601,80	126.925,70	313.080,00
10	Kab. Solok	117.542,85	48.245,45	12.799,27	5.645,18	9.808,67	179.758,58	373.800,00
11	Kab. Solok Selatan	83.794,72	65.836,33	53.684,20	13.049,50	19.753,96	98.501,28	334.620,00
12	Kab. Tanah Datar	19.682,90	20.125,40	-	9.317,98	96,53	84.377,19	133.600,00
13	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	2.524,00	2.524,00
14	Kota Padang	12.066,08	23.938,32	245,36	-	-	33.246,24	69.496,00
15	Kota Padang Panjang	601,77	4,14	-	-	-	1.694,09	2.300,00
16	Kota Pariaman	-	-	-	-	-	7.336,00	7.336,00
17	Kota Payakumbuh	347,28	-	-	-	-	7.695,72	8.043,00
18	Kota Sawahlunto	120,60	-	139,11	5.078,25	4.219,54	17.787,51	27.345,00
19	Kota Solok	342,99	770,01	-	-	-	4.651,00	5.764,00
	JUMLAH/***Total***	791.671,00	769.774,66	233.210,58	360.608,00	187.629,00	1.886.836,76	4.229.730,00

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Juni 2013

KPA/KSA : Kawasan Pelestarian Alam/Kawasan Suaka Alam/Nature Conservation Area/Nature Sanctuary Area
HL : Hutan Lindung
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HP : Hutan Produksi Tetap
HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi
APL : Areal Penggunaan Lain

Selain data di atas, juga terlihat gambaran penanganan kerusakan hutan seperti tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3 Indikator Kehutanan

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	7.120	4.523	615	1.627	838
2	Kerusakan kawasan hutan			70.058	18.224	
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	0	0,18712	0,187061	0,185005	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan untuk pembangunan **peternakan** di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan di provinsi ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan

`

prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, yang terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 7 unit, pasar ternak 29 unit, TPH 32 unit, poskeswan 41 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 110 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit.

Pengembangan usaha perternakan dilakukan dengan pendekatan agribisnis melalui pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak.Kawasan peternakan di Sumatera Barat antara lain Kawasan Sentra Produksi Sapi, Kerbau dan Unggas dan Kawasan Terintegrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya untuk **kawasan industri** membutuhkan areal cukup luas, dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri dengan pendekatan sentra yang tersebar pada hampir semua kabupaten kota. Seperti sentra industri industri makanan di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan industri kerajinan di Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang juga kaya akan hasil pertambangan, terutama batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya. Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dariWilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Wilayah yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut WIUP di Provinsi Sumatera Barat terdapat di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Sawahlunto, yang meliputi usaha pertambangan batubara dan pertambangan mineral.

Wilayah pertambangan rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat.WPR ditetapkan oleh bupati/walikota, sesuai pasal 21, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan.Kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan rakyat di Provinsi Sumatera Barat cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Lokasi ini belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR). Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaan pertambangan beralih menjadi kewenangan provinsi.Oleh sebab itu penetapan

`

prioritas WPR akan menjadi kewenangan provinsi.

Wilayah pencadangan negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusakan sebagaian luasnya statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK).

Hampir semua wilayah administrasi merupakan rencana usaha pertambangan, karena 17 dari 19 wilayah administrasi kabupaten/kota mempunyai bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi. Untuk pengembangan potensi minyak, gas bumi dan geothermal pengembangan menjadi : (1) Blok North Kuantan; (2) Blok Bukit Barisan Barat Daya; (3) Wilayah kerja geothermal Solok, dan (4) Wilayah kerja geothermal Solok Selatan

Sementara untuk pengembangan **kawasan perikanan** di Sumatera Barat terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan perikanan perairan umum. Untuk kawasan perikanan tangkap dikembangkan di 2 kota dan 5 Kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan.Zona perikanan tangkap komersil (pelagis) terdapat di perairan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengarah ke lautan Hindia dan perairan Kabupaten Pesisir Selatan.

Seluruh kawasan pesisir kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat disamping dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut juga untuk pertambakan, keramba dan budidaya rumput laut, serta kerang-kerangan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membangun konstruksi infrastruktur di lahan pantai guna kepentingan penyimpanan (gudang), pengolahan hasil dan transportasi sarana/input produksi budidaya laut.

2.1.1.8 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Masalah kependudukan sangat erat kaitannya dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Salah satu metode untuk melihat atau mengukur daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup adalah dengan pendekatan jasa ekosistem, yaitu nilai manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan kepada ekosistem. Jasa ekosistem dikelompokkan atas beberapa kelompok sehingga pada akhirnya terdapat 23 klasifikasi jasa ekosistem, dimana dalam kaitannya dengan pembangunan

`

kependudukan, yang dinilai paling terkait adalah jasa penyediaan bahan makanan, jasa penyediaan air bersih, jasa pengaturan kualitas udara, jasa pengaturan air, jasa pengaturan pengolahan limbah, jasa budaya estetika dan jasa budaya pendidikan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan keduanya. Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah juga mengindikasikan semakin tingginya kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (DDDTLH Provinsi Sumatera Barat, 2017).

Dengan berdasarkan data dan analisis dari dokumen DDDTLH Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka seyogyanya pola persebaran penduduk kedepannya disinkronkan dan diarahkan sesuai kemampuan dan/atau karakteristik wilayah yang akan ditempati oleh penduduk tersebut.

Secara singkat, gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat untuk beberapa jasa ekosistem tersebut di atas dapat dideskripsikan dalam bentuk peta terkait, sebagai berikut:

2.1.1.8.1 Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar

Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Provinsi Sumatera Barat dengan kategori sangat tinggi dan tinggi adalah di Kabupaten Dharmasraya dengan luas 199.526,53 Ha atau 23,79% dan Kabupaten Pasaman Barat 193.711,20 Ha atau 23,10%. Untuk kategori sedang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 148.404,15 Ha atau 12,89% dan Kabupaten Limapuluh Kota dengan luas 132.892,81 Ha atau 11,54%.

`

Gambar 2.3
Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup

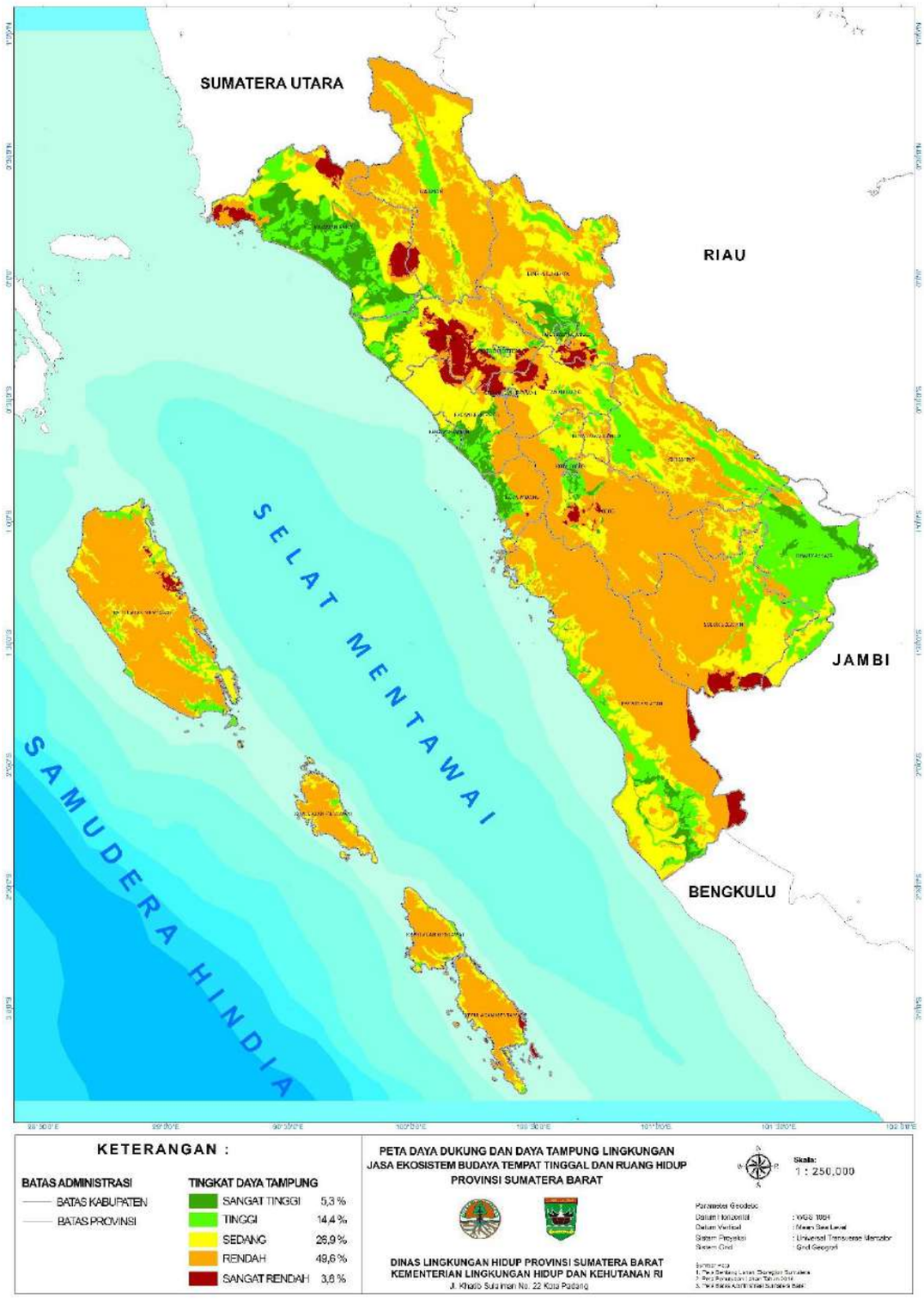

2.1.1.8.2 Jasa Penyediaan Pangan

Jasa penyediaan pangan adalah jasa ekosistem dalam menghasilkan barang yang dapat digunakan untuk pangan, baik dikonsumsi langsung maupun menjadi bahan baku bagi produksi pangan. Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan pangan di Provinsi Sumatera Barat hanya sebagain kecil yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.1a bahwa hanya 18,01% luasan lahan di Sumatera Barat yang memberikan daya dukung yang tinggi pada jasa penyediaan pangan.

`

Daya dukung sangat tinggi dan tinggi tersebar pada banyak Kabupaten, namun dominan berada di Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Pesisir Selatan. Tiga Kabupaten ini berkontribusi lebih dari 50% luasan lahan yang memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi dalam jasa penyediaan pangan. Sementara itu, wilayah yang memberikan daya dukung yang rendah atas jasa pangan berada sebagian besar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan dan Pasaman.

Gambar 2.4
Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
Jasa Penyediaan Pangan

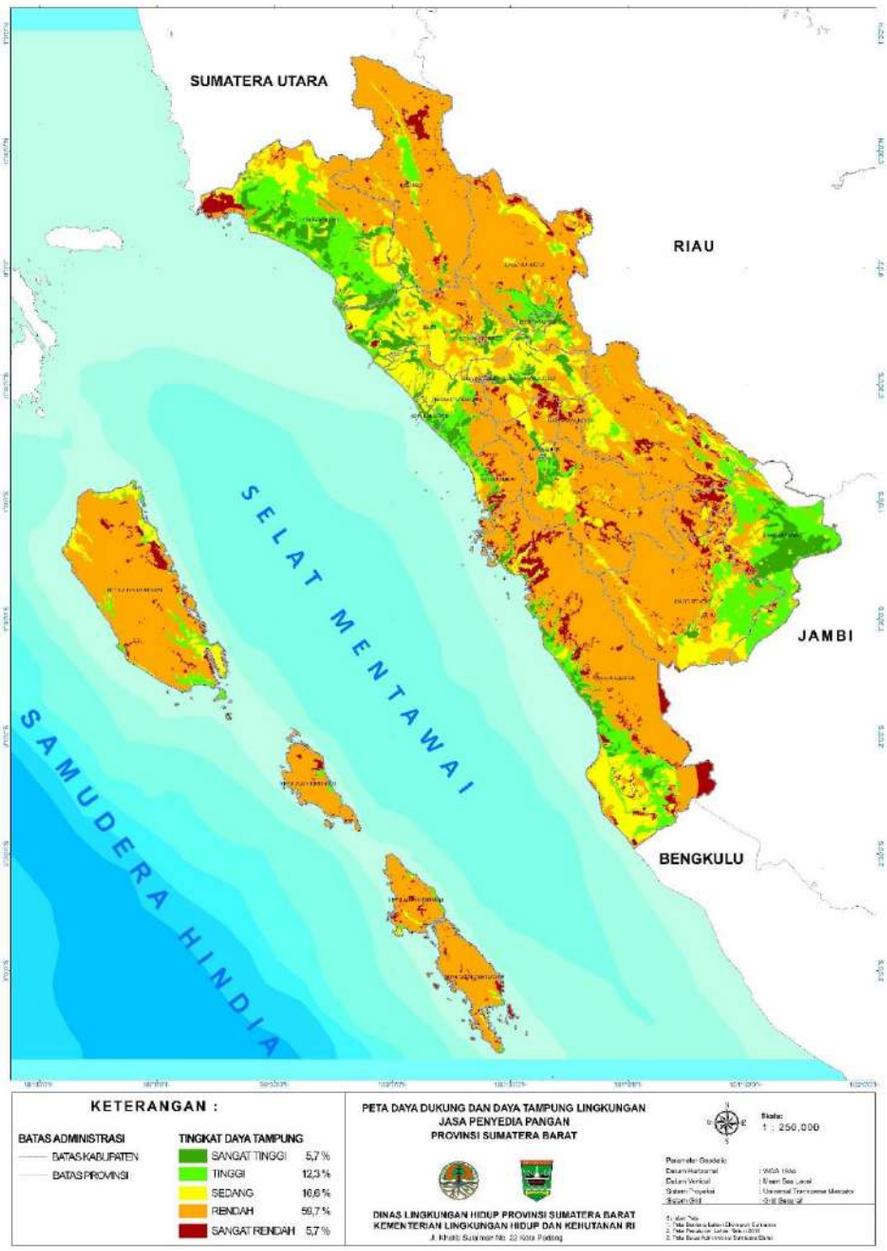

2.1.1.8.3 Jasa Penyedia Air Bersih

Luasan lahan yang mendukung jasa penyediaan air bersih di Provinsi Sumatera Barat secara umum dikategorikan rendah dan sangat rendah.

Jasa penyediaan air bersih di Sumatera Barat sangat minim dari segi kemampuan penyediaannya, yang termasuk kategori sangat tinggi dan tinggi hanya 11,51%. Daya dukung jasa penyediaan air bersih yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi (dengan luasan 491.764,12 Ha)

`

sebagian berada di Kabupaten Pasaman Barat (35,66 %), Kabupaten Dharmasraya (17,75%) dan Kabupaten Pesisir Selatan (14,84%).

Gambar 2.4
Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
Jasa Penyediaan Air Bersih

2.1.1.8.4 Jasa Pengaturan Pencegahan Dan Perlindungan Dari Bencana

Jasa pengaturan dalam pencegahan dan perlindungan dari bencana termasuk memberikan informasi tentang kemampuan dari suatu daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk terlindungi dari bencana baik, longsor, kekeringan, banjir, erupsi dan lainnya.

Daya tampung Provinsi Sumatera Barat dalam hal jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana ini memiliki kontribusi terhadap pencegahan kerugian baik moril dan materil. Kategori rendah dan sangat rendah pada jasa ini dengan luasan terbesar di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Limapuluh Kota dengan luasan daerah 138.736,08 Ha atau setara dengan 14,07%. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan

`

dengan luasan masing-masing 13,81% dan 13,41%. Kabupaten Pesisir Selatan meskipun pada kategori tinggi dan sangat tinggi memiliki dukungan yang cukup luas hingga 23,61% namun sebagian wilayahnya juga masuk kategori rendah dan sangat rendah.

Gambar 2.5
Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana

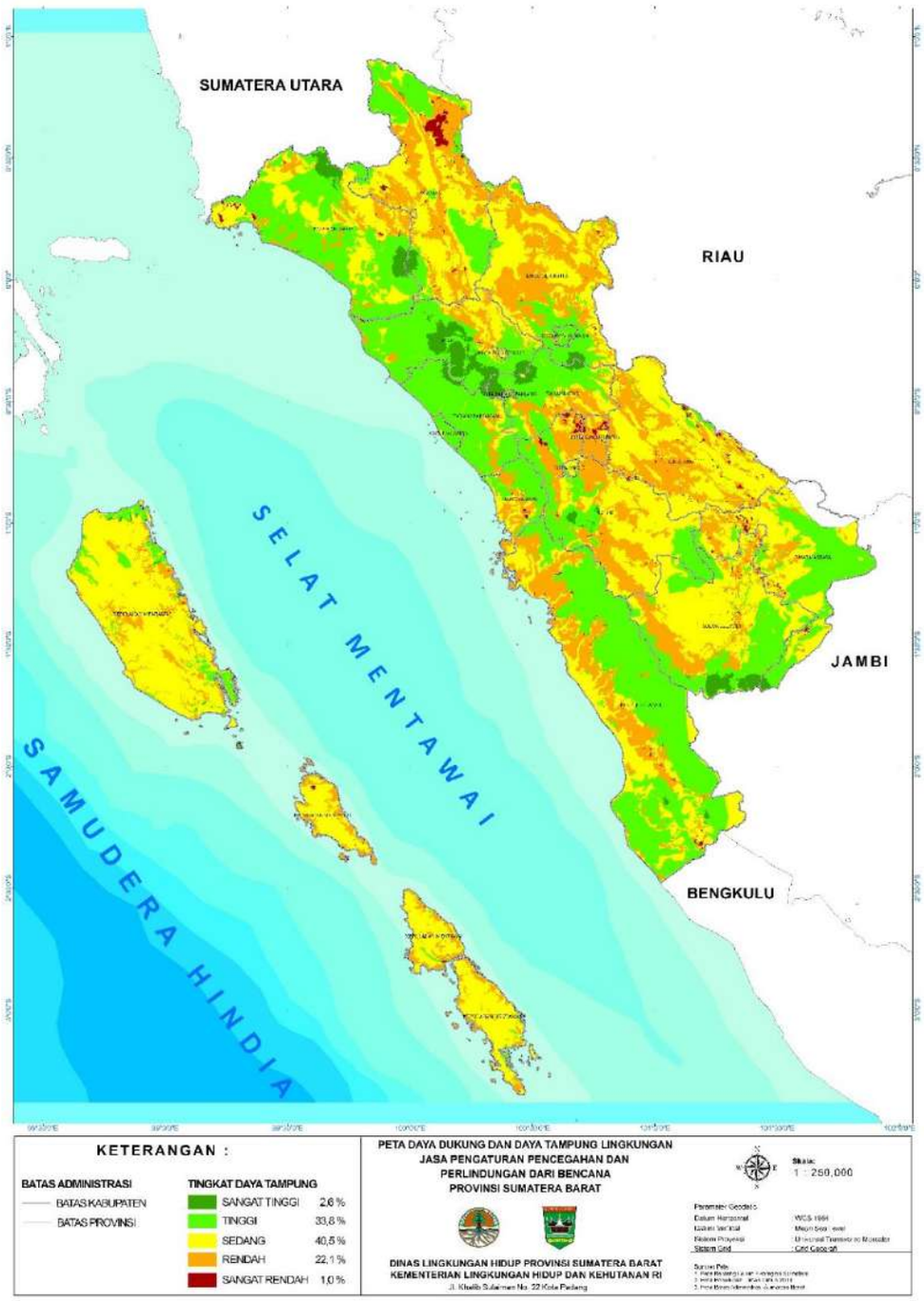

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng *Indo-Australia* dan *Euro Asia* di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.Selain itu wilayah Sumatera Barat mempunyai jenis tanah yang mudah longsor. Tabel 2.4memperlihatkan wilayah daerah rawan bencana.

`

Tabel 2.4
Wilayah Daerah Rawan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten / Kota	Daerah Rawan Bencana / Potensi Bencana			
		Potensi Gerakan Tanah/ Longsor	Potensi Banjir Bandang / Banjir	Potensi Tsunami	Potensi Gempa Darat / Laut
	Kabupaten :				
1	Kepulauan Mentawai	Menengah	Menengah-Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
2	Pesisir Selatan	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Menengah-Tinggi	Gempa Laut
3	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
4	Sijunjung	Menengah	-	-	-
5	Tanah Datar	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	-	Gempa Darat
6	Padang Pariaman	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
7	Agam	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Tinggi	Gempa Darat
8	Lima Puluh Kota	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	-	
9	Pasaman	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	-	Gempa Darat
10	Solok Selatan	Menengah – Tinggi	-	-	
11	Dharmasraya	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
12	Pasaman Barat	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	-	Gempa Darat
	Kota :				
13	Padang	Menengah - Tinggi	Menengah-Tinggi	Tinggi	Gempa Laut
14	Solok	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
15	Sawahlunto	Menengah – Tinggi	-	-	-
16	Padang Panjang	Menengah - Tinggi	-	-	Gempa Darat
17	Bukittinggi	Menengah	Menengah	-	Gempa Darat
18	Payakumbuh	-	Menengah-Tinggi	-	-
19	Pariaman	-	-	Menengah-Tinggi	Gempa Laut

Keterangan :

1. Menengah – Tinggi :
   Daerah yang mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, maka pergerakan tanah yang lama dapat aktif kembali.
2. Menengah :
   Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
3. Tinggi :
   Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Bencana Tsunami ,Gerakan Tanah, Banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi bencana yang sangat tinggi akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi bencana, terutama pada daerah kabupaten/ Kota yang berada di Pesisir Pantai yang berpotensi akan terjadinya Tsunami.

Berdasarkan Tabel 2.4, semua Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat mempunyai wilayah yang berpotensi untuk mengalami bencana. Oleh sebab itu kegiatan pencegahan dan program penyiapan menghadapi bencana perlu mendapat perhatian oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.2 Potensi Ekonomi Daerah

Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat dapat ditinjau dalam berbagai aspek antara lain potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan panas bumi, potensi pengembangan ekonomi wilayah, seperti terlihat pada Gambar 2.6.

`

Gambar 2.6
Pengembangan Wilayah Koridor Ekonomi di Sumatera Barat

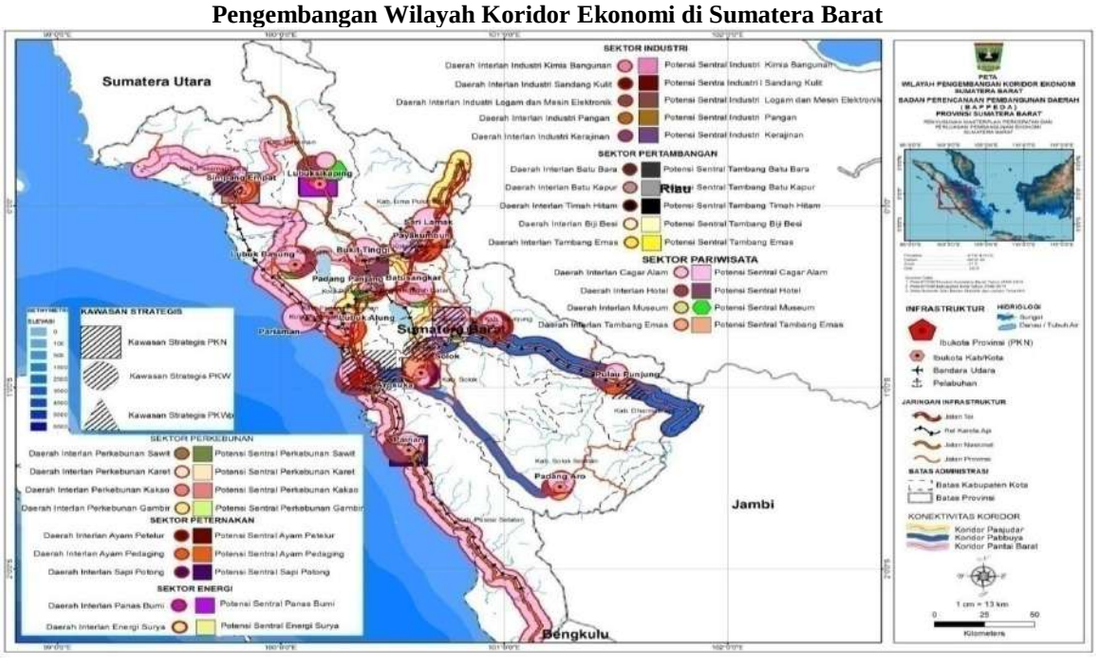

Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2013 tentang Master Plan Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2013-2025 yang menetapkan wilayah pengembangan ekonomi menjadi tiga koridor, yaitu:

1. Koridor Gerbang Timur: Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota merupakan pusat produksi industri, perdagangan, pariwisata alam dan peternakan.
2. Koridor Lintas Sumatera: Padang, Solok, Kota Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan industri agro.
3. Koridor Pantai Barat: Pasaman Barat, Agam, Pasaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai merupakan pusat produksi pertanian, perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya, industri agro dan pariwisata bahari.

Pembahasan tentang potensi ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan memperhatikan Keuntungan Komparatif (Comparative Advantage) dari masing-masing kabupaten dan kota secara relatif dalam provinsi Sumatera Barat. Dengan cara demikian, potensi ekonomi suatu kabupaten dan kota yang diukur dengan nilai tambah dari masing-masing sektor dan subsektor dibandingkan potensi ekonomi rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Ini berarti bahwa suatu sektor atau sub sektor dikatakan mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar bilamana kegiatan produksinya relatif lebih menonjol baik jumlahnya maupun pertumbuhannya.

2.2.1 Pertanian.

Sektor pertanian masih menjadi sektor strategis bagi perekonomian Sumatera Barat meskipun kontribusi sektor pertanian ini dari tahun ke tahun memperlihatkan penurunan yang diiringi dengan peningkatan sektor lainnya, hal ini sejalan dengan pergeseran perekonomian yang semakin mengarah ke

`

sektor sekunder dan tersier. Secara umum, tidak berarti bahwa kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terus mengecil, karena yang dicatat dalam sektor pertanian adalah aspek produknya saja, sedangkan pengolahan/industri hasil pertanian yang terus meningkat nilainya tercatat dalam sektor industri.

Setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki potensi pertanian unggulan yang berbeda. Pasaman Barat memiliki paling banyak komoditi unggulan utama yakni padi ladang, jagung, sawit dan ikan laut. Beberapa kabupaten yang memiliki lebih dari satu komoditi unggulan utama, seperti Kabupaten Lima Puluh Kota dengan komoditi unggulan gambir, dan ayam petelur, Kabupaten Padang Pariaman dengan komoditi unggulan kakao, kelapa, dan ikan darat, Kabupaten Agam dengan komoditi unggulan Budidaya Ikan, Kakao, Kelapa Sawit. Pada sisi lain terdapat dua kota yang tidak memiliki komoditi unggulan pertanian sama sekali yakni Kota Solok dan Kota Sawahlunto.

Jumlah produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Sumatera Barat terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Di Sumatera Barat Tahun 2012-2017

KOMODITI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Poduksi						
Padi (Ton)	2.368.390	2.430.384	2.519.020	2.550.609	2.503.452	
Palawija (Ton)	845.802	911.278	992.059	978.593	1.058.689	
Sayur-sayuran (Ton)	498.286	574.019	531.133	608.579	639.384	
Buah-Buahan (Ton)	481.897	468.061	492.577	523.207	538.000	
Tanaman Hias (Tangkai/Kg)	694.838	582.305	779.165	719.742	671.114	
Tanaman Biofarmaka (Kg)	7.414.098	9.508.247	10.160.753	11.670.135	11.921.026	
Produktifitas						
Padi (Kw/Ha)	49,71	49,82	50,06	50,25	50,90	
Palawija (Kw/Ha)	89,91	92,14	89,53	95,02	92,19	
Sayur-sayuran (Kw/Ha)	130,08	125,98	115,36	133,19	133,11	
Buah-Buahan (Kw/Ha)	26,78	26,53	28,01	28,99	30,91	
Tanaman Hias (Tangkai/Kg/M2)	8,60	4,16	6,59	12,03	5,91	
Tanaman Biofarmaka (Kg/M2)	3,27	3,65	3,31	3,21	4,01	

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat

Tabel 2.6
Kontribusi Sektor Tanaman Pangan dan Tanaman Holtikultura terhadap PDRB
Tahun 2014 - 2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB (Rp)	12.642.622,36	9.487.665,47	9.417.462,06	13.991.607,52
2	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	7,57	7,30	6,68	6,52
3	kontribusi sektor tanaman holtikultura terhadap PDRB (Rp)	5.886.419,86	5.167.773,73	5.279.779,67	7.147.545,16
4	kontribusi sektor tanaman holtikultura terhadap PDRB (%)	3,52	3,44	3,42	3,33
5	produktivitas padi perhektar (Ku/Ha)	50,06	50,25	50,9	52,47

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat

`

Data di atas menunjukkan bahwa kontribusi sekctor tanaman pangan dan sektor holtikultura terhadap PDRB berfluktuasi secara nominal namun cenderung mengalami penurunan apabila dilihat dari segi persentase kontribusi.

Tabel 2.7
Nilai Tukar Petani
Tahun 2014 - 2018

No	Indeks NTP	NTP Sumatera Barat (2012=100)					
		Rata-Rata					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	NTP	100,61	97,74	97,67	96,97	95,31	40,69
2	Ib (Indeks Yang Dibayar)	111,87	117,76	122,48	126,47	131,56	50,85
3	iT (Indeks Yang Diterima)	112,54	115,09	119,62	122,64	125,39	49,61

Sumber : Data BPS Prov. Sumbar

Perkebunan

1. Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa dalam, pinang, casiavera, gambir dan lain-lain. Sebaran area perkebunan menurut jenis komoditas utama di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
2. Karet, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto;
3. Sawit, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam;
4. Kakao, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman;
5. Gambir, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang;
6. Kelapa dalam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Kopi Arabika, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok;
8. Kopi Robusta, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok;
9. Kayu Manis, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Luas tanam dan produksi perkebunan di Sumatera Barat sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 berdasarkan komoditi terlihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat
Tahun 2012-2017

No	Komoditi Perkebunan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Tanam (Ha)							
1	Kelapa Sawit	358.029	367.094	390.380	392.315	384.238	
2	Karet	173.505	174.890	178.997	180.769	181.002	
3	Kelapa Dalam	91.965	91.438	89.717	89.900	87.298	
4	Kakao	137.355	150.319	157.578	159.413	145.761	

`

No	Komoditi Perkebunan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5	KopiArabica	20.881	20.881	21.027	21.053	17.265	
6	Kopi Robusta	19.886	21.853	21.867	21.873	20.200	
7	Gambir	21.412	23.537	32.307	32.309	31.791	
8	Cassiavera	38.840	43.606	49.685	49.702	38.946	
Produksi (Ton)							
1	Kelapa Sawit	941.579	999.074	1.152.187	1.161.039		
2	Karet	144.983	149.002	151.145	151.772	163.801	
3	Kelapa Dalam	86.383	86.815	82.979	83.661	78.902	
4	Kakao	59.836	69.281	80.001	85.095	67.844	
5	Kopi Arabica	15.651	15.670	15.862	15.607	12.004	
6	Kopi Robusta	15.259	16.697	17.966	18.452	10.288	
7	Gambir	14.220	14.782	17.160	17.391	17.036	
8	Cassiavera	23.557	23.542 26.919	23.511 27.481	27.737	15.879	

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat

Tabel 2.9
Kontribusi Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB
Tahun 2014 - 2017

No	Indikator	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	kontribusi sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (Rp)	11.682.220,03	9.389.697,28	9.729.428,04	14.198.135,13
2	kontribusi sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)	6.96	6,68	6,69	6,62

Sumber data: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat

Data di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB berfluktuasi baik secara nominal maupun secara persentase.

2.2.2 Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Barat yang berada di sisi barat pantai barat pulau Sumatera, pada bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, bagian Selatan dengan Provinsi Bengkulu, bagian Timur dengan Propinsi Riau dan Provinsi Jambi, dan bagian Barat dengan Samudra Hindia, terdiri dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota, 7 (tujuh) kabupaten/Kota di antaranya berhubungan dengan laut, yaitu: Kabupaten Kep. Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Pasaman Barat.

Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan laut dan perairan umum) menyimpan potensi yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi produktif maupun konservasi dan dapat dijadikan andalan pembangunan masa depan.

Perairan laut Sumatera Barat mempunyai luas total wilayah sebesar 179.760,23 km^2 (luas zona territorial sebesar 57,880 km^2 dan luas zona ekslusif sebesar 128,700 km^2) sementara itu luas perairan umum pada tahun 2015 tercatat mempunyai luas lahan sebesar 124.202,82 Ha.

Perkembangan produksi perikanan dari tahun 2010 – sampai tahun 2015 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,08 % per tahun seperti terlihat pada Tabel 2.5. Selanjutnya produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan rata-rata 21,65% per tahun, perikanan tangkap 1,29 % per tahun dan

`

perairan umum sebesar 1,8 % per tahun. Produksi perikanan laut mengalami penurunan sebesar 4,64 %, hal ini disebabkan antara lain menurunnya jumlah nelayan perikanan tangkap pada tahun 2015 dan diduga pengaruh fenomena cuaca ekstrim.

Jumlah nelayan perikanan laut di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 tercatat sebanyak 42.061 orang yang terdiri nelayan penuh 28.133 orang dan nelayan sambilan 13.928 orang, dengan sarana tangkap yang digunakan adalah perahu tanpa motor sebanyak 1.160 unit, motor temple 6.512 unit dan kapal motor sebanyak 2.197 unit.

Tabel 2.10
Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat
Tahun 2012-2017 (Ton)

No	Realisasi	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Perikanan Laut (ton)	197.460,20	211.003,40	214.733,60	204.771,00	207.268.00	211.530.70
2	Perairan Umum	10.406,60	10.372,40	10.464,80	10.688,90	10.814,00	11.073,70
3	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	180.664	206.869,49	262.863,21	286.711,58	269.837,92	266.991,30
	Total	388.531,11	428.245,29	488.061,61	502.171,48	487.919,92	489.595,70

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Produksi Perikanan Laut (ton)

Penetapan Sumatera Barat sebagai sentral utama produksi ikan tongkol dan tuna kawasan barat Indonesia bagian barat yang dicanangkan Presiden RI pada tahun 2006 dan hasil kesepakatan IMTGT tahun 2007 di Phuket Thailand membuka peluang daerah ini untuk memodernisasi potensi sumberdaya perikanannya, khususnya ikan tuna dan pada tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menambah unggulan untuk wilayah barat Indonesia menjadi provinsi Sumatera Barat sebagai sentra Tuna, Tongkol dan Cakalang (TTC). Ke depan, pengembangan industri ikan tongkol dan tuna di Sumatera Barat diperkirakan akan mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena kondisi tersebut didukung oleh topografi wilayah Sumatera Barat yang sangat strategis di Kawasan Barat Indonesia. Hal ini akan menjadi modal besar sebagai penghasil ikan tongkol dan tuna yang selama ini ditangkap di wilayah perairan Samudera Hindia dan sebagian besar didaratkan di Muara Baru Jakarta, sedangkan pelabuhan Bungus sebagai tempat pendaratan ikan yang lebih dekat dari lokasi atau sentral penangkapan.

Pemerintah Sumatera Barat terus berusaha untuk mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur di Pelabuhan Samudera Bungus. Keberhasilan pembangunan infrastruktur pendukung utama kegiatan ekspor, seperti pengembangan PPS Bungus, Bandara BIM bertaraf internasional dan fasilitas cargo langsung ke luar negeri dapat mempercepat pembangunan perikanan daerah serta menjadi daya tarik bagi investor sektor perikanan berekspansi di daerah ini. Bila semua kondisi perikanan Sumatera Barat makin baik maka pemanfaatan ikan tuna dapat ditingkatkan.

Komoditi perikanan yang bernilai ekonomi sangat penting dari hasil tangkapan adalah ikan tuna, cakalang, dan udang. Produksi komoditi ini yang diperoleh pada fishing ground utama perairan laut Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.4.

`

Gambar 2.7
Produksi Tiga Jenis Komoditi Bernilai Ekonomis Utama Perikanan Tangkap di Perairan Laut Sumatera Barat Tahun2015

- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kota Padang
- Kota Pariaman

Jenis Ikan	Produksi (Ton)
Tuna	1.255,1
Cakalang	7.401,2
Udang	1.575,7

Sumber: DKP Prov. Sumbar 2015

Peta Jenis Ikan Tangkapan Utama Provinsi Sumatera Barat

Selain tiga jenis hasil tangkapan utama yakni tuna, cakalang, dan udang yang bernilai ekspor tinggi terdapat juga jenis ikan dan komoditi perikanan lainnya yang juga bernilai ekonomis baik untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri. Misalnya ikan tongkol, tenggiri, cumi-cumi, sotong, gurita, rumput laut, dan sebagainya.

Kegiatan perikanan budidaya air tawar dilakukan di lingkungan perairan. Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi ikan perikanan budidaya ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota yaitu:Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya.Bentuk kegiatan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah sistem kolam, kolam air deras, karamba, jaring apung, dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah minapadi.

Budidaya air payau biasa dilakukan pada kolam di daerah pesisir dengan salinitas air berkategori sedang hingga mendekati salinitas air laut. Kolam air payau (*brackish water pond*) yang disebut tambak. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman secara geografi menjadi wilayah untuk pengembangan budidaya air payau di Sumatera Barat.

Berdasarkan tingkat produksi masing-masing daerah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah pemasok ikan terbesar dan menjadi sentra produksi perikanan laut terpenting di Sumatera Barat. Diikuti oleh enam sentra produksi perikanan laut lainnya seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai produsen perikanan laut terbesar, Kabupaten Pasaman Barat menghasilkan sekitar 40 % produksi perikanan Sumatera Barat.

Berbagai jenis ikan dihasilkan dari tujuh sentra produksi perikanan laut di atas. Setidaknya terdapat tujuh jenis ikan laut dengan tingkat produksi yang besar seperti tatengkek, kwee, tongkol, selar, teri dan udang. Melihat dari jenis dan jumlah ikan yang dihasilkan, sekitar 20 sampai 30 persen atau sekitar 41,1 ribu ton diantaranya merupakan jenis ikan yang memungkinkan dikalengkan. Jumlah ini relatif sangat memadai dalam sebuah industri pengalengan ikan. Namun demikian, sejauh ini industri pengolahan hasil perikanan laut di Sumatera Barat masih didominasi oleh pengolahan bercorak tradisional seperti pada Tabel 2.11

`

Tabel 2.11
Jenis Industri Pengolahan Sumatera Barat

NO	KABUPATEN / KOTA	INDUSTRI PENGOLAHAN
	Kabupaten :	
1.	Kepulauan Mentawai	Penggaraman pengeringan
2.	Pesisir Selatan	Penggaraman pengeringan
3.	Solok	Pengasapan, pengolahan lain
4.	Sawahlunto	Pengasapan, segar, pengolahan lain
5.	Tanah Datar	Pengolahan lain
6.	Padang Pariaman	Penggaraman, pemindangan, surimi, segar
7.	Agam	Penggaraman pengeringan, pengasapan
8.	Lima Puluh Kota	Penggaraman pengeringan, pengasapan
9.	Pasaman	Pengeringan, pengasapan
10.	Solok Selatan	Pengeringan, pengolahan lain
11.	Dharmasraya	Pengasapan, pengolahan lain
12.	Pasaman Barat	Penggaraman pengeringan, segar
	Kota :	
13.	Padang	Penggaraman, pemindangan, surimi, abon, segar
14.	Solok	Pengasapan, pereduksian
15.	Sawah Lunto	Pengolahan lain
16.	Padang Panjang	Pengasapan, surimi
17.	Bukittinggi	Pengasapan, pengolahan lain
18.	Payakumbuh	Pengasapan, pengolahan lain
19.	Pariaman	Penggaraman pengeringan, pereduksian

Sumberdaya Ekosistem Pesisir dan Maritim: Hutan Bakau Terumbu Karang, Padang Lamun dan Rumput Laut

Keanekaragaman hayati laut Sumatera Barat yang terdapat di ekosistem pesisir (ekosistem *mangrove*, terumbu karang dan rumput laut) memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produkif. Ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (coral reef), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut, karena berfungsi sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (spawning ground dan ekosistem pesisir berupa hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reef*), lamun dan rumput laut memiliki fungsi ekologis yang vital bagi kelestarian sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut. Karena, ekosistem-ekosistem tersebut selain sebagai habitat bagi berbagai populasi organisme bahari selama hidupnya juga merupakan daerah pemijahan (*spawning ground*) dan pembesaran (*nursery ground*) dari populasi lain yang membentuk struktur komunitas sumberdaya perikanan laut sebelum populasi tersebut baik secara individual maupun komunal bermigrasi ke perairan samudera. Di samping fungsi bioekologi, keberadaan ekosistem bakau dan terumbu karang sangat penting pula perannya dalam melindungi pantai dari pengikisan oleh gelombang laut.

Luas terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 diperkirakan 36.693,27 Ha dengan rata-rata tingkat kerusakan mencapai 82%. Kerusakan terjadi akibat proses yang berlangsung secara alami

`

di samping dampak aktifitas manusia seperti tergerus oleh jangkar kapal, membom ikan, pengambilan karang, dsb. Usaha-usaha untuk menanggulangi keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai proyek pelestarian terumbu karang mencakup kegiatan pengembangan mata pencarian alternative bagi masyarakat pesisir dan kegiatan melibatkan masyarakat dalam penanaman terumbu karang (*coral farming*).

Sebaran terumbu karang di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.12. Terumbu karang yang terdapat di perairan laut Sumatera Barat pada umumnya adalah jenis terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang ini menyebar sepanjang garis pantai walaupun terdapat juga beberapa koloni terumbu karang yang tersebar secara mengelompok (*patch reef*).

Permintaan pasar dunia terhadap produk industri pengalengan ikan sangat besar, sementara konstribusi produk industri pengalengan ikan nasional sangat kecil yaitu 4%. Pemain utama regional dan dunia pada industri pengolahan ikan khususnya tuna dan sardines adalah Thailand, Spanyol, Filipina, Australia, Afrika Selatan, Srilangka, Mardives, Maroko, Peru dan Chili. Negara Thailand masih merupakan negara eksportir utama tuna kaleng, sedangkan Philipina terus berkembang. Amerika Serikat saat ini masih merupakan negara importir utama tuna kaleng. Di mana negara pengonsumsi tuna kaleng terutama di Eropa terus meningkat.

Kontribusi ekspor ikan tuna dalam kaleng relatif besar. Hal ini berhubungan dengan permintaan ikan tuna dalam kaleng yang jauh lebih besar dibanding dengan ikan dalam kaleng jenis sardines, mackerel, salmon dan lainnya. Pasar dalam negeri volume pasar ikan tuna dalam kaleng jauh lebih kecil daripada ikan sardines dan mackerel dalam kaleng. Industri pengolahan ikan tuna dalam kaleng di Indonesia lebih memfokuskan pada pasar ekspor. Dalam pengembangan industri pengolahan ikan dan hasil laut harus diupayakan untuk mengisi pangsa pasar dunia.

Dilihat dari besarnya kebutuhan ikan tuna untuk dunia, Sumatera Barat punya peluang besar untuk meningkatkan produksi yang dapat diolah baik dalam bentuk ikan tuna kaleng maupun ikan tuna beku dan ikan tuna olahan beku. Untuk mendukung peningkatan produksi, pemerintah Sumatera Barat perlu meningkatkan fasilitas pendorong produksi baik produksi tangkap maupun pengolahan.

Dengan besarnya potensi SDA, produksi ikan tuna dan sejenisnya di Sumatera Barat maka sangat diperlukan sekali pengembangan fasilitas penolong lainnya seperti ketersediaan es curah, ruang pendingin (cool storage) sarana penangkapan, perbaikan kapal BBM, air bersih dan berbagai fasilitas lainnya.

Ekosistem padang lamun dan rumput laut antara lain tersebar di Kabupaten Pasaman yakni di Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Teluk Tapang. Spesies yang ditemui mayoritas 5 jenis antara lain: *Cymodocea semulata, Enhalus acocoides, Halodule universis, Halophila ovalis,* dan *Thalassia hemphrichii*. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan spesies mayoritas *Enhaulus acoroides* dan *Thalassia hemphrichii*. Penyebaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama ditemukan di Pagai Utara Selatan dan Siberut dengan spesies yang dominan adalah *Thalassia hemphricii* di Kota Padang banyak terdapat di sungai pisang dan Pulau Pisang dengan mayoritas jenis *Enhalus acoroides dan Thalassia hemphricii*. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*.

`

Kawasan Konservasi Perairan

Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah menetapkan tujuh lokasi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang tersebar di beberapa kabupaten. KKLD tersebut berada di Pulau Kerabak Ketek dan Pulau Penyu (Kabupaten Pesisir Selatan), P. Kasiak dan P. Talua (Kabupaten Pasaman Barat), P. Saibi dan Saliguma (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Organisma laut yang menjadi salah satu tujuan utama konservasi dan sangat menjadi perhatian internasional adalah penyu. Sumatera Barat memiliki potensi penyu yang cukup besar terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyu biasa mendarat di pulau-pulau kecil dengan kondisi yang landai dan bersih. Eksploitasi penyu di Sumatera Barat terutama untuk diambil telurnya telah menyebabkan hewan ini berkurang populasinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat melalui dana APBN lima tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan, terkait dengan pelestarian penyu seperti bantuan MPA (Mata Pencaharian Alternatif), memberikan sarana pendukung penangkaran seperti (Bak pemeliharaan dan rumah jaga). Telah dilaksanakan fasilitas kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pada tahun 2011 dilaksanakan *restocking* perairan umum lubuk larangan di 11 kabupaten/kota sebanyak 648.200 ekor bibit ikan yang terdiri dari 453.200 ekor bibit ikan nila berukuran 5-8 cm dan bibit ikan mas sebanyak 195.000 ekor.

Pulau-Pulau Kecil dan Pariwisata Bahari

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk keperluan usaha perikanan, pengembangan hutan *mangrove*, terumbu karang dan wisata bahari. Pada saat ini pemerintah menetapkan kawasan Mandeh sebagai ikon wisata bahari Sumatera Barat. Perairan laut Sumatera Barat memiliki aset pulau-pulau kecil. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau.

Dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 25 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Selanjutnya potensi wisata bahari yang sangat besar dan bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (*World Champions Surfing Series*) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun$\pm$3.000 wisatawan asing datang ke Kepuluan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US$ 2.500 per orang selama kunjungan.

2.2.3 Industri.

Salah satu potensi industri yang dapat diunggulkan untuk wilayah Sumatera Barat, mengingat luasnya kawasan perairan laut adalah insutri pengolahan ikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pembangunan Industri Nasional, dimana industri pengolahan hasil laut telah ditetapkan pengembangannya melalui pendekatan klaster dalam membangun daya saing yang berkelanjutan. Pengembangan industri

`

pengolahan hasil laut dengan pendekatan klaster diperlukan jaringan yang saling mendukung dan menguntungkan antara industri pengguna dengan industri pendukung serta industri terkait lainnya melalui kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun lembaga lainya termasuk perguruan tinggi dan lembaga litbang.

Pengembangan terhadap industri pengolahan ikan tuna dan sejenisnya, Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang mempunyai potensi dan peluang besar untuk dikembangkan. Hal ini sangat didukung dengan ketersediaan dari SDA dan sarana prasarana seperti pelabuhan perikanan samudera Bungus.

Untuk masa mendatang selain potensi industri pengolahan ikan, usaha industri kecil menengah di Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah secara terpadu, komprehensif, intensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian peranan sektor industri akan semakin besar dalam pembentukan ekonomi Sumatera Barat.

Tabel 2.12
Pertumbuhan Industri Pengolahan Sumatera Barat
Dibandingkan Industri Pengolahan Nasional (%)Tahun 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertumbuhan sektor industri Sumatera Barat	5,22	1,84	4,90	2,26	-0,57
Pertumbuhan sektor industri Nasional	4.64	4.33	4.26*	4.27**	Not available

Sumber: BPS Sumbar, Produk Domestik Regional Bruto SumBar Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018 (didownload)
BPS, PDB Indonesia Triwulanan 2014 -2018 (didownload)
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

Tabel 2.14 memperlihatkan pertumbuhan industri pengolahan di Sumatera Barat selama periode 2014-2018.Pertumbuhan sektor ini cenderung berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir dan hingga -0,57% pada tahun 2018. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sektor industri belum mampu tumbuh seperti yang di harapkan.

Tabel 2.13
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	11,02	10,56	10,21	10,11	9,71	9,27
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Laju pertumbuhan industri	%	5,1	5,22	1,84	NA	2,26	NA

Sumber : Aspek Fokus Sumatera Barat

2.2.4 Perdagangan.

Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di Sumatera Barat pada periode 2014-2018 berfluktuatif dan cenderung naik dalam 3 tahun terakhir, yaitu dari 5,41% pada tahun 2015 menjadi 7,03% pada tahun 2018. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan nasional yang hanya kisaran 4% pada tahun 2015, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.16.

`

Tabel 2.14
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Sumatera Barat
Dibandingkan Sektor Perdagangan Nasional (%) Tahun 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertumbuhan sektor industri Sumatera Barat	5.56	5.38	5.41	6.50	7.03
Pertumbuhan sektor industri Nasional	5.18	2.54	4.03*	4.44**	Not available

Sumber: BPS Sumbar, Produk Domestik Regional Bruto SumBar Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018 (didownload)
BPS, PDB Indonesia Triwulanan 2014 -2018 (didownload)
**angka sementara*
***angka sangat sementara*

Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.15
Nilai Ekspor, Nilai Impor dan Ekspor Bersih
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 - 2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Ekspor (US$ juta)	2.105,61	1.748,00	1.708,28	2.046,26	1.595,01
2	Nilai Impor (US$ juta)	1.034,60	632,80	345,25	446,26	546,34
3	Ekspor Bersih Perdagangan (US$ juta)	1.071,01	1.115,20	1.363,03	1.600,00	1.048,67

Sumber data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam 5 tahun nilai ekspor dan impor cenderung menurun dan ekspor bersih berfluktuasi.

Tabel 2.16
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,77	14,38	14,64	14,86	15,05	15,33
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US$ Juta	1 174,00	1 071,00	1.115,21	1.362,80	1.599,75	NA

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

2.2.5 Jasa.

Jasa Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2018, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,15 triliun rupiah atau 1,36 persen. Penyediaan Makan Minum merupakan kontributor terbesar terhadap kategori ini yakni sebesar 74,58 persen.Kategori ini merupakan kategori dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua di tahun 2018. Tahun 2018 kategori ini tumbuh sebesar 8,23 persen, sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun 2017

`

yakni 8,76 persen. Melambatnya pertumbuhan kategori ini disebabkan oleh subkategori Penyediaan Makan Minum sebesar 8,23 persen di tahun 2018

Jasa Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2014-2018 relatif stabil, di kisaran 5 persen.Cepat lambatnya pertumbuhan kategori ini tidak lepas dari upaya peningkatan fasilitas dan kecepatan layanan yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti pengembangan jaringan fiber optic. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet termasuk untuk transaksi on line juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi. Laju pertumbuhan kategori Informasi dan Komunikasi menunjukkan perlambatan, yaitu sebesar 8,74 persen di tahun 2017 hingga menjadi 8,57 persen di tahun 2018.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada sublapangan usaha Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi pere-konomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini. Selama tahun 2014-2018, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 60 persen terhadap PDRB kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi. Berikutnya adalah lapangan usaha Jasa Keuangan Lainnya dengan sumbangan sekitar 32,92 persen. Kontribusi Subkategori Asuransi dan Dana Pensiun dan Jasa Penunjang Keuangan terhadap kategori ini masing-masing kurang dari 5 persen.

Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 1 (satu) persen untuk tahun 2014-2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan dengan peranan kategori lain.Laju pertumbuhan kategori Jasa Perusahaan cenderung mengalami perlambatan. Angka 6,97 persen pada tahun 2014 melambat hingga 5,45 persen pada tahun 2018.

Jasa Pendidikan

Pada tahun 2018 jasa pendidikan menyumbang sebesar 4,20 persen terhadap total perekonomian Provinsi Sumatera Barat, naik dari tahun 2014 yang sebesar 3,62 persen. Kontribusinya meningkat dari 5,97 triliyun rupiah menjadi 9,68 triliun di tahun 2018. Tren pertumbuhan kategori ini berfluktuasi namun cenderung naik, dari 6,88 persen menjadi 7,19 persen pada periode 2014-2018.

`

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2018, kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,39 persen dan laju pertumbuhan sebesar 7,28 persen. Selama tahun 2014-2018 peranannya relatif stabil. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu lebih besar dari 7 persen.

Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 relatif kecil yaitu 4,45 triliyun rupiah. Kontribusinya sejak 2014-2018 relatif stabil di kisaran kurang dari 2 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan rata- rata pertumbuhan tahun 2014-2018 sebesar 8,49 persen.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Bidang Jasa Provinsi Sumatera Barat

	2014	2015	2016	2017	2018
Jasa akomodasi dan makan minum	6.44	6.85	9.62	8.76	8.23
Jasa informasi dan komunikasi	8.42	9.10	9.40	8.74	8.57
Jasa keuangan dan asuransi	4.79	3.63	8.03	2.11	0.99
Jasa perusahaan	6.97	5.91	4.94	5.19	5.45
Jasa pendidikan	6.88	7.82	7.85	9.94	7.19
Jasa kesehatan dan kegiatan social	7.97	7.51	5.47	8.58	7.28
Jasa lainnya	7.75	9.55	9.35	7.95	7.86

Sumber: BPS Sumbar, Produk Domestik Regional Bruto SumBar Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018 (didownload)
*angka sementara
**angka sangat sementara

2.2.6 Pariwisata.

Sektor pariwisata dalam sistem perekonomian Sumatera Barat termasuk ke dalam beberapa sektor dalam struktur Product Domestic Regional Bruto (PDRB) yakni pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, komunikasi dan angkutan seperti angkutan kereta api, angkutan jalan raya, angkutan udara dan jasa penunjang angkutan. Sektor jasa terutama sub sektor hiburan dan rekreasi. Oleh karena itu, untuk melihat kontribusi Pariwisata Sumatera Barat, maka akan dilihat dari sektor-sektor atau sub-sub sektor yang berkaitan dengan aktifitas pariwisata itu sendiri, sesuai dengan batasan dan definisi pariwisata yang dikemukakan pada bagian tulisan sebelumnya.

Pariwisata yang dirancang dan dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan berkelanjutan. Sektor ini memiliki hubungan erat dengan sektor lain dan menciptakan pekerjaan yang layak serta menghasilkan peluang perdagangan. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai aktivitas pariwisata yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas yang relevan dalam mempromosikan kesadaran lingkungan, melestarikan dan melindungi lingkungan, satwa liar, flora, keanekaragaman hayati, ekosistem dan keragaman budaya, serta meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat setempat dengan

`

mendukung perekonomian lokal, lingkungan manusia dan alam secara keseluruhan.

Kunjungan wisatawan dalam kegiatan pariwisata bisa dibagi dalam beberapa kategori yakni : Wisatawan Mancanegara yang berasal dari negara-negara selain Indonesia; Wisatawan Nusantara yang berasal dari daerah-daerah di luar Sumatera Barat; Wisatawan Domestik berasal dari wilayah-wilayah di luar wilayah yang dikunjungi tetapi masih satu provinsi; Wisatawan Lokal berasal dari daerah yang sama dengan tempat tinggal wisatawan dengan tujuan berekreasi ke tempat-tempat hiburan alam maupun buatan. Dengan mengetahui asal, jumlah dan pengeluaran pemerintah maupun swasta, pelaku usaha pariwisata akan dapat melakukan perencanaan pemasaran yang tepat-sasaran dan efektif.

Berdasarkan data statistik, Sumatera Barat bukan hanya memiliki potensi pariwisata yang sangat layak untuk dikembangkan menjadi andalan utama penghasil devisa tetapi juga menjadikan pariwisata sebagai andalan yang memutar roda perekonomian dalam propinsi. Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat aktifitas pariwisata Sumatera Barat, di samping jumlah tamu menginap dan lamanya tinggal pada penginapan dan hotel menurut klasifikasinya. Indikator lain untuk melihat kontribusi pariwisata terhadap aktivitas perekonomian wilayah adalah jumlah rumah makan dan restoran yang memberikan pelayanan kepada tamu dari luar, sektor transportasi yang memberikan pelayanan biro perjalanan wisata mulai dari angkutan udara, angkutan darat, dan lainnya. Terakhir jasa hiburan dan rekreasi dalam struktur PDRB Sumatera Barat. Semuanya akan dilihat berdasarkan wilayah tujuan wisata di Sumatera Barat.

Perkembangan pariwisata Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut:

Tabel 2.18
Indikator Pariwasata Provinsi Sumatera Barat

No	Tahun	Kunjungan Wisatawan (orang)	Lama Kunjungan (hari)	PAD Sektor Pariwisata (Rupiah)
1	2014	6.675.279	1,65	104.593.349.950
2	2015	7.051.952	1,56	88.485.338.286
3	2016	7.427.459	1,40	98.076.348.534
4	2017	7.480.189	1,53	141.262.721.286
5	2018	8.127.439	1,47	170.821.255.106

Sumber data: Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah wisatawan yang berkunjung maupun dari pendapatan dari sektor pariwisata namun lama kunjungan wisatawan berfluktuasi.

`

Tabel 2.19
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang Provinsi Sumatera Barat

No	Bulan	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Sumatera Barat				
		Hotel Non Bintang				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Januari	39.50	36.60	35.14	34.55	28.55
2	Februari	36.03	32.45	38.03	29.81	31.92
3	Maret	36.75	35.55	34.88	32.42	29.55
4	April	35.56	34.45	35.34	36.72	30.98
5	Mei	37.15	43.30	36.17	28.68	30.37
6	Juni	32.28	30.68	25.06	27.76	33.18
7	Juli	32.28	37.41	35.88	36	35.13
8	Agustus	39.82	36.45	32.93	33.68	30.65
9	September	37.36	34.34	29.98	34.25	28.51
10	Oktober	35.49	36.23	31.19	31.89	31.37
11	November	36.39	36.18	35.93	36.39	32.24
12	Desember	41.11	42.22	41.02	42.02	34.39

Sumber : Data BPS Prov. Sumbar

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat hunian hotel non bintang mengalami fluktuasi namun turun pada tahun 2018. Tingkat hunian tinggi pada akhir tahun yakni bulan Desember.

Tabel 2.20
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Provinsi Sumatera Barat

No	Bulan	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Sumatera Barat					
		Hotel Berbintang					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Januari	40.87	41.70	44.32	40.85	47.34	46.14
2	Februari	46.89	37.22	50.39	47.22	53.51	53.11
3	Maret	50.89	42.59	50.96	55.67	53.47	57.34
4	April	48.93	51.72	54.66	58.78	60.30	56.22
5	Mei	54.43	55.40	60.67	55.28	49.96	34.57
6	Juni	52.73	49.81	40.23	41.05	48.57	
7	Juli	39.02	43.24	49.23	57.31	58.09	
8	Agustus	52.55	50.58	56.87	54.86	59.45	
9	September	49.56	52.68	52.30	59.27	56.81	
10	Oktober	53.14	60.91	49.59	59.64	65.06	
11	November	55.21	57.10	60.78	65.05	65.35	
12	Desember	50.97	59.73	61.51	64.89	-	

Sumber : Data BPS Prov. Sumbar

TPK hotel berbintang dalam 5 tahun terakhir cenderung naik namun turun pada tahun 2018 (data hingga bulan Mei). Tingkat hunian tinggi pada akhir tahun yakni bulan Desember.

Sektor pariwisata dalam sistem perekonomian Sumatera Barat termasuk ke dalam beberapa sektor dalam struktur Product Domestic Regional Bruto (PDRB) yakni pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, komunikasi dan angkutan seperti angkutan kereta api, angkutan jalan raya, angkutan udara dan jasa penunjang angkutan. Sektor jasa terutama sub sektor hiburan dan rekreasi. Oleh karena itu, untuk melihat kontribusi Pariwisata Sumatera Barat, maka akan dilihat dari sektor-

`

sektor atau sub-sub sektor yang berkaitan dengan aktifitas pariwisata itu sendiri, sesuai dengan batasan dan definisi pariwisata yang dikemukakan pada bagian tulisan sebelumnya.

Pariwisata yang dirancang dan dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan berkelanjutan. Sektor ini memiliki hubungan erat dengan sektor lain dan menciptakan pekerjaan yang layak serta menghasilkan peluang perdagangan. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai aktivitas pariwisata yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas yang relevan dalam mempromosikan kesadaran lingkungan, melestarikan dan melindungi lingkungan, satwa liar, flora, keanekaragaman hayati, ekosistem dan keragaman budaya, serta meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat setempat dengan mendukung perekonomian lokal, lingkungan manusia dan alam secara keseluruhan.

Kunjungan wisatawan dalam kegiatan pariwisata bisa dibagi dalam beberapa kategori yakni: Wisatawan Mancanegara yang berasal dari negara-negara selain Indonesia; Wisatawan Nusantara yang berasal dari daerah-daerah di luar Sumatera Barat; Wisatawan Domestik berasal dari wilayah-wilayah di luar wilayah yang dikunjungi tetapi masih satu provinsi; Wisatawan Lokal berasal dari daerah yang sama dengan tempat tinggal wisatawan dengan tujuan berekreasi ke tempat-tempat hiburan alam aupun buatan. Dengan mengetahui asal, jumlah dan pengeluaran pemerintah maupun swasta, pelaku usaha pariwisata akan dapat melakukan perencanaan pemasaran yang tepat-sasaran dan efektif.

Berdasarkan data statistik, Sumatera Barat bukan hanya memiliki potensi pariwisata yang sangat layak untuk dikembangkan menjadi andalan utama penghasil devisa tetapi juga menjadikan pariwisata sebagai andalan yang memutar roda perekonomian dalam propinsi. Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat aktifitas pariwisata Sumatera Barat, di samping jumlah tamu menginap dan lamanya tinggal pada penginapan dan hotel menurut klasifikasinya. Indikator lain untuk melihat kontribusi pariwisata terhadap aktivitas perekonomian wilayah adalah jumlah rumah makan dan restoran yang memberikan pelayanan kepada tamu dari luar, sektor transportasi yang memberikan pelayanan biro perjalanan wisata mulai dari angkutan udara, angkutan darat, dan lainnya. Terakhir jasa hiburan dan rekreasi dalam struktur PDRB Sumatera Barat. Semuanya akan dilihat berdasarkan wilayah tujuan wisata di Sumatera Barat.

Tabel 2.21
Perkembangan Indikator Urusan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	62 023	69 541	78 274	84.177	89.225	78.223
2	Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	6261364	6 605 738	6 973 678	7.343.282	7.783.876	8.073.070

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

`

2.2.7 Penanaman Modal.

Tabel 2.22
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal

NO	INDIKATOR	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA), (Data Tahunan, untuk perusahaan yang merealisasikan						
	- PMDN	investor	17,00	25,00	74,00	113,00	131,00
	- PMA	investor	18,00	24,00	51,00	52,00	73,00
2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA), (Data Tahunan, untuk perusahaan yang						
	- PMDN (Rp. Juta)	Rp. Juta	1.233.021,83	3.185.075,82	3.795.575,50	1.516.964,30	2.309.449,60
	- PMA (US $ Ribu)	US $ ribu	29.568,14	39.754,32	79.268,10	194.425,20	180.799,70
3	Ratio Penyerapan Tenaga Kerja Tahunan						
	- PMDN	orang/proyek	1 : 87	1 : 82	1 : 26	1 : 24	1 : 15
	- PMA	orang/proyek	1 : 85	1 : 183	1 : 25	1 : 8	1 : 41
4	Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi						
	- PMDN (Rp. Juta)	Rp. Juta	359.259,93	1.952.053,99	610.499,68	(2.278.611,20)	792.485,30
	- (%)	%	41,12	158,31	19,17	-60,03	52,24
	- PMA (US $ Ribu)	US $ ribu	106.553,29	10.186,18	39.513,78	115.157,10	(13.625,50)
	- (%)	%	78,28	34,44	99,39	145,28	-7,01

2.3 Komponen Kependudukan

2.3.1 Kuantitas

Kuantitas penduduk dibagi menjadi komposisi dan persebaran penduduk. Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, seperti kelompok umur, karakteristik sosial ekonomi, dan persebaran atau distribusi tempat tinggalnya. Pengelompokan ini berguna untuk: mengetahui jumlah sumber daya manusia yang ada menurut umur, jenis kelamin maupun karakteristik lainnya; mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan; menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan; membandingkan keadaan suatu penduduk dengan keadaan penduduk lainnya; mengetahui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk

2.3.1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tahun	Lk	Pr	TOTAL	Rasio
2016	2.758.043	2.694.231	5.452.274	102,37
2017	2.789.477	2.721.769	5.511.246	102,49
2018	2.782.576	2.736.669	5.519.245	101,68

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Perbandingan penduduk Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan cenderung seimbang dengan rasio jenis kelamin pada kisaran 101% – 102%.

2.3.1.2 Rasio Kepadatan Penduduk

No	Elemen	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5.452.274	5.511.246	5.519.245
2	Luas Wilayah (Km2)	42.012	42.012	42.012
3	Kepadatan (Jiwa/Km2)	129,78	131,18	131,37

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

`

Berdasarkan data di atas, kepadatan penduduk di Sumatera Barat dapat diklasifikasikan kurang padat (Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960).

2.3.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis dari unsur-unsur laju pertambahan dan unsur-unsur yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasikan kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

No	Indikator	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018
1	Laju Pertumbuhan	0,91	1,08	0,15

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Berdasarkan data tahun 2015-2016 sampai dengan 2017-2018 di atas, pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat dapat diklasifikasikan sebagai pertumbuhan penduduk rendah.

2.3.1.4 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur

Kelompok Umur	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
	Laki-Laki	Perempuan	Total (Jiwa)	Laki-Laki	Perempuan	Total (Jiwa)	Laki-Laki	Perempuan	Total (Jiwa)
00-04	183.368	170.122	353.490	175.617	162.611	338.228	194.508	180.108	374.616
05-09	261.426	242.786	504.212	263.073	244.777	507.850	267.030	247.795	514.825
10-14	274.976	257.115	532.091	278.099	258.616	536.715	279.707	260.358	540.065
15-19	269.991	254.603	524.594	277.032	259.731	536.763	274.763	259.114	533.877
20-24	251.175	238.471	489.646	257.804	242.574	500.378	253.545	239.971	493.516
25-29	220.811	206.547	427.358	219.824	205.830	425.654	210.791	198.584	409.375
30-34	235.253	217.921	453.174	229.754	214.138	443.892	213.078	203.576	416.654
35-39	206.075	193.305	399.380	218.093	202.039	420.132	210.466	200.631	411.097
40-44	185.810	185.541	371.351	188.646	185.758	374.404	185.372	184.520	369.892
45-49	154.760	156.230	310.990	164.375	165.060	329.435	162.262	165.029	327.291
50-54	140.131	148.867	288.998	137.772	146.308	284.080	139.589	148.793	288.382
55-59	123.135	129.675	252.810	125.293	132.578	257.871	121.762	131.745	253.507
60-64	100.847	107.298	208.145	101.019	109.165	210.184	105.786	115.679	221.465
65-69	59.240	62.214	121.454	66.353	68.724	135.077	72.346	75.574	147.920
70-74	40.672	51.941	92.613	35.465	47.175	82.640	36.809	47.338	84.147
> 75	50.373	71.595	121.968	51.258	76.685	127.943	54.762	77.854	132.616
Jumlah	**2.758.043**	**2.694.231**	**5.452.274**	**2.789.477**	**2.721.769**	**5.511.246**	**2.782.576**	**2.736.669**	**5.519.245**

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Penduduk Sumatera Barat paling banyak berkisar pada umur 10 – 19 tahun.

`

2.3.1.5 Umur Median

No	Indikator	2016	2017	2018
1	Umur Median	28,77	28,94	28,70

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Secara keseluruhan penduduk Sumatera Barat berdasarkan klasifikasi umur median di kategorikan penduduk intermediate.

2.3.1.6 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan diatas umur 65 tahun). Makin tingi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Tabel 3.8 menunjukan jumlah penduduk berdasarkan struktur umur.

No	Indikator	2016	2017	2018
1	Rasio Ketergantungan	46,31	45,69	48,17

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Secara umur rasio ketergantungan penduduk Sumatera Barat berada di bawah 50% atau dengan angka beban ketergantungan rendah.

2.3.1.7 Piramida Penduduk

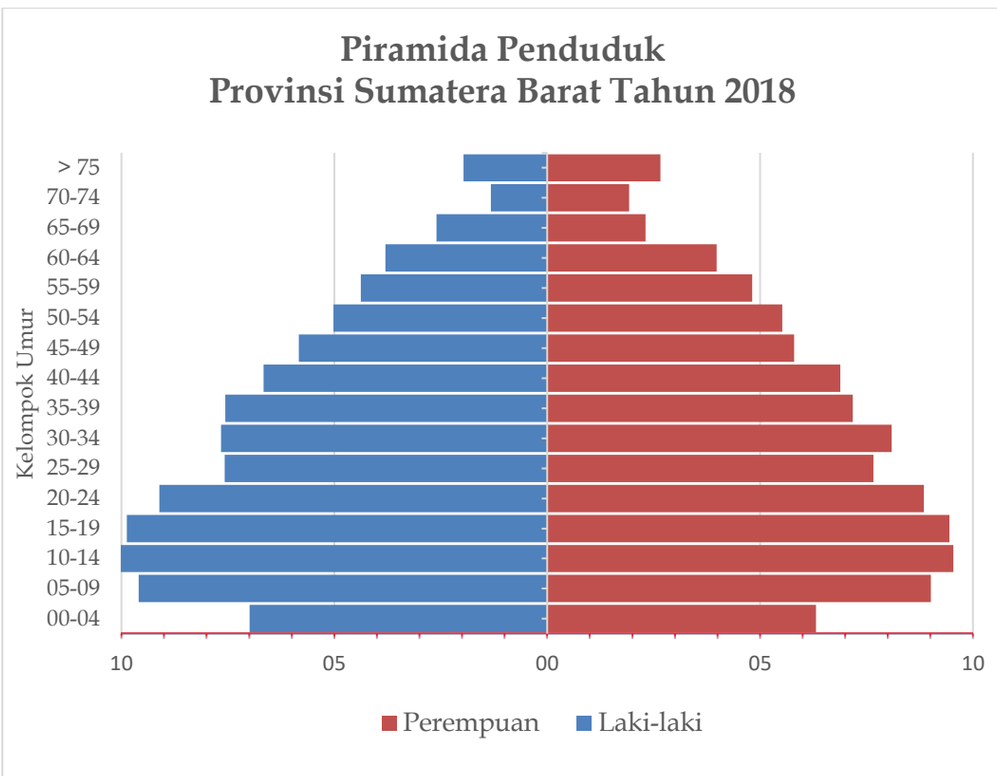

Sumber: DKB Semester II Tahun 2018 (Diolah)

`

Menurut bentuknya, piramida penduduk Sumatera Barat pada tahun 2017 dinamakan piramida penduduk dengan bentuk “kendi”, terdapat pada daerah yang mengalami penurunan tingkat kelahiran secara drastis dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun. Jumlah penduduk usia 15 tahun lebih banyak dibandingkan dengan penduduk umur 0-14 tahun.

Sedangkan menurut cirinya, piramida penduduk Sumatera Barat berbentuk dinamika konstriktif (constrictive) bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda.

2.3.1.8 Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah

Tahun	Penduduk Usia SD/ sederajat (7 - 12 Tahun)			Penduduk Usia SMP / sederajat (13 - 15 Tahun)			Penduduk Usia SMA / sederajat (16 - 18 Tahun)		
	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
2016	323.581	301.343	624.924	165.462	155.101	320.563	162.551	152.944	315.495
2017	324.631	302.078	626.709	169.836	158.978	328.814	169.554	158.748	328.302
2018	330.427	307.041	637.468	170.599	159.062	329.661	163.432	154.415	317.847

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Penduduk Sumatera Barat yang berusia sekolah tingkat SD/sederajat hingga SMA/sederajat dari tahun ke tahun mendominasi jumlah penduduk keseluruhan yakni sekitar 23%.

2.3.1.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	2016	2017	2018
Tidak/Belum Sekolah	Laki - Laki	576.073	595.173	620.974
	Perempuan	546.597	563.399	585.772
	Jumlah	1.122.670	1.158.571	1.206.746
Belum Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	467.604	477.939	478.783
	Perempuan	443.655	449.747	447.475
	Jumlah	911.259	927.686	926.258
Tamat SD/Sederajat	Laki - Laki	571.882	564.077	542.230
	Perempuan	572.093	562.786	546.862
	Jumlah	1.143.975	1.126.863	1.089.092
SLTP/Sederajat	Laki - Laki	428.621	427.877	412.914
	Perempuan	389.047	387.604	380.868
	Jumlah	817.668	815.481	793.782
SLTA/Sedrajat	Laki - Laki	572.262	577.706	573.919
	Perempuan	533.061	537.779	538.599
	Jumlah	1.105.323	1.115.485	1.112.518
Diploma I/II	Laki - Laki	11.705	11.158	10.476
	Perempuan	31.119	29.745	28.229
	Jumlah	42.824	40.903	38.705
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	Laki - Laki	29.392	30.024	30.900
	Perempuan	50.134	52.338	55.332
	Jumlah	79.526	82.362	86.232
Diploma IV/Strata I	Laki - Laki	91.509	96.157	102.480
	Perempuan	121.408	130.682	145.090
	Jumlah	212.917	226.839	247.570

`

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	2016	2017	2018
Strata II	Laki - Laki	8.158	8.511	9.040
	Perempuan	6.648	7.209	7.952
	Jumlah	14.806	15.720	16.992
Strata III	Laki - Laki	837	855	860
	Perempuan	469	480	490
	Jumlah	1.306	1.335	1.350
Total	Laki - Laki	2.758.043	2.789.477	2.782.576
	Perempuan	2.694.231	2.721.769	2.736.669
	Jumlah	5.452.274	5.511.246	5.519.245

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

`

2.3.1.10 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Agama/Keprcyaan	Jenis Kelamin	2016	2017	2018
Islam	Laki - laki	2.692.277	2.722.321	2.722.321
	Perempuan	2.632.693	2.658.858	2.658.858
	Jumlah	5.324.970	5.381.176	5.381.176
Kristen	Laki - laki	40.745	41.952	41.952
	Perempuan	37.442	38.552	38.552
	Jumlah	78.187	80.504	80.504
Katholik	Laki - laki	22.884	23.099	23.099
	Perempuan	22.111	22.397	22.397
	Jumlah	44.995	45.496	45.496
Hindu	Laki - laki	57	56	56
	Perempuan	52	50	50
	Jumlah	109	106	106
Budha	Laki - laki	1.944	1.921	1.921
	Perempuan	1.821	1.796	1.796
	Jumlah	3.765	3.717	3.717
Konghuchu	Laki - laki	5	4	4
	Perempuan	3	3	3
	Jumlah	8	7	7
Kepercayaan	Laki - laki	131	124	124
	Perempuan	109	113	113
	Jumlah	240	237	237
Total	Laki - laki	2.758.043	2.789.477	2.782.576
	Perempuan	2.694.231	2.721.769	2.736.669
	Jumlah	5.452.274	5.511.246	5.519.245

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

`

2.3.1.11 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin

No	Status Kawin	Jenis Kelamin	2016	2017	2018
1	Belum Kawin	Laki - laki	1.524.709	1.544.060	1.531.710
		Perempuan	1.235.987	1.245.322	1.248.073
		Jumlah	2.760.696	2.789.382	2.779.783
2	Kawin	Laki - laki	1.190.744	1.201.597	1.205.393
		Perempuan	1.214.237	1.232.242	1.239.102
		Jumlah	2.404.981	2.433.839	2.444.495
3	Cerai Hidup	Laki - laki	14.672	16.105	16.616
		Perempuan	45.168	46.565	47.454
		Jumlah	59.840	62.670	64.070
4	Cerai Mati	Laki - laki	27.918	27.715	28.857
		Perempuan	198.839	197.640	202.040
		Jumlah	226.757	225.355	230.897
5	TOTAL	Laki - laki	2.758.043	2.789.477	2.782.576
		Perempuan	2.694.231	2.721.769	2.736.669
		Jumlah	5.452.274	5.511.246	5.519.245

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

2.3.1.12 Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perkawinan Kasar
		Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Perkawinan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	514,107	4,351	8.46
2	Kabupaten Solok	380,692	3,751	9.85
3	Kabupaten Sijunjung	235,913	1,818	7.71
4	Kabupaten Tanah Datar	369,374	3,471	9.40
5	Kabupaten Padang Pariaman	446,240	4,292	9.62
6	Kabupaten Agam	527,730	4,662	8.83
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	377,826	3,355	8.88
8	Kabupaten Pasaman	317,500	2,533	7.98
9	Kabupaten Kep. Mentawai	86,593	124	1.43
10	Kabupaten Dharmasraya	210,268	1,467	6.98
11	Kabupaten Solok Selatan	179,796	1,299	7.22
12	Kabupaten Pasaman Barat	430,740	3,645	8.46
13	Kota Padang	894,299	6,631	7.41
14	Kota Solok	72,669	539	7.42
15	Kota Sawahlunto	65,710	509	7.75
16	Kota Padang Panjang	57,165	436	7.63
17	Kota Bukittinggi	120,387	793	6.59
18	Kota Payakumbuh	136,501	1,152	8.44
19	Kota Pariaman	91,743	839	9.15
	Sumatera Barat	**5,515,246**	**45,667**	**8.28**

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

`

2.3.1.13 Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar, karena dengan perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu yang berumur diatas 15 tahun.

Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perkawinan Umum
		Usia 15 tahun keatas	Jumlah Perkawinan	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	375.541	4.351	11.59
2	Kabupaten Solok	283.385	3.751	13.24
3	Kabupaten Sijunjung	174.187	1.818	10.44
4	Kabupaten Tanah Datar	288.051	3.471	12.05
5	Kabupaten Padang Pariaman	311.780	4.292	13.77
6	Kabupaten Agam	403.826	4.662	11.54
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	286.723	3.355	11.70
8	Kabupaten Pasaman	234.431	2.533	10.80
9	Kabupaten Kep. Mentawai	61.383	124	2.02
10	Kabupaten Dharmasraya	152.132	1.467	9.64
11	Kabupaten Solok Selatan	133.466	1.299	9.73
12	Kabupaten Pasaman Barat	309.121	3.645	11.79
13	Kota Padang	669.156	6.631	9.91
14	Kota Solok	53.190	539	10.13
15	Kota Sawahlunto	49.459	509	10.29
16	Kota Padang Panjang	42.117	436	10.35
17	Kota Bukittinggi	89.387	793	8.87
18	Kota Payakumbuh	102.785	1.152	11.21
19	Kota Pariaman	69.619	839	12.05
	Sumatera Barat	**4.089.739**	**45.667**	**11.17**

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

2.3.1.14 Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

No	Indikator	2016	2017	2018
1	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	NA	NA	NA

2.3.1.15 Rata-rata Umur Kawin Pertama

No	Indikator	2016	2017	2018
1	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	NA	NA	NA

`

2.3.1.16 Angka Perceraian Kasar

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi fertilitas dalam arti mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan. Angka perceraian kasar berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka ini juga merupakan indicator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitung kan umur dan jenis kelamin. Bagi daerah yang tidak ada pencatatan mengenai perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun pelayanan pelayanan keluarga.

No	Pengadilan Agama	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Angka Perceraian Kasar
			Pada Pertengahan Tahun	Jumlah Perceraian	
1	Painan	Kabupaten Pesisir Selatan	514,107	291	0.57
2	Solok	Kabupaten Solok	380,692	320	0.71
		Kota Solok	72,669		
3	Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	235,913	366	1.55
4	Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar	369,374	539	1.46
5	Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman	446,24	709	1.32
		Kota Pariaman	91,743		
6	Maninjau	Kabupaten Agam	527,73	421	0.80
	Lubuk Basung				
7	50 Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	377,826	428	1.13
8	Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman	317,5	271	0.85
9	Koto Baru	Kabupaten Dharmasraya	210,268	484	2.30
	Pulau Punjung				
10	Muaro Labuh	Kabupaten Solok Selatan	179,796	250	1.39
11	Talu	Kabupaten Pasaman Barat	430,74	445	1.03
12	Padang	Kota Padang	894,299	1,232	1.26
		Kabupaten Kep. Mentawai	86,593		
13	Sawahlunto	Kota Sawahlunto	65,71	240	3.65
14	Padang Panjang	Kota Padang Panjang	57,165	287	5.02
15	Bukittinggi	Kota Bukittinggi	120,387	651	5.41
16	Payakumbuh	Kota Payakumbuh	136,501	559	4.10
	Sumatera Barat		**5,515,246**	**7,493**	**1.36**

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

2.3.1.17 Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perceraian kasar. Angka perceraian ini hanya memperhatikan kepada penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang telah menikah dan bercerai hidup.

`

2.3.1.18 Kelahiran

2.3.1.18.1 Jumlah Kelahiran

No	Jenis Kelamin	Keterangan	2015	2016	2017
1	Laki-laki	Hidup	48.220	47.144	47.594
		Mati	347	326	312
		Hidup + Mati	48.567	47.470	47.938
2	Perempuan	Hidup	47.976	47.026	47.531
		Mati	285	282	277
		Hidup + Mati	48.261	47.308	47.808
3	Laki-laki + Perempuan	Hidup	96.196	94.170	95.125
		Mati	632	608	592
		Hidup + Mati	96.828	94.778	95.717

Sumber data: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

2.3.1.18.2 Angka Kelahiran Kasar

Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*/CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu.

Tahun	2017	2018
Jumlah Penduduk Pada Pertengahan Tahun *	5.481.760	5.515.246
Jumlah Kelahiran **	95.125	95.510
CBR	17,35	17,32

Sumber data: * Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)
**Profil Kesehatan Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)

2.3.1.19 Kematian

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut, Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dll.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh: faktor ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, jenis kelamin, dll. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat menular atau penyakit degeneratif, kecelakaan maupun penyebab lain.

Kematian dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif, kecelakaan atau gaya hidup yang beresiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah.

`

2.3.1.19.1 Jumlah Kematian

2.3.1.19.2 Angka Kematian Kasar

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk. Penduduk tua mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Angka Kematian Kasar adalah indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Tetapi jika tidak ada indikator kematian yang lain angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari Angka kelahiran Kasar akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.

2.3.1.20 Bidang Lain

2.3.1.20.1 Umum

2.3.1.20.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.20.2.1 Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Definisi Operasional Indikator Perbandingan jalan dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan dikali 100 persen.

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	
		2016	2017
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1.070,50	1.083,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

Analisis tabel diatas terlihat bahwa panjang jaringan jalan dalam kondisi mengalami peningkatan/ bertambah per tahunnya.

2.3.1.20.2.2 Panjang Jalan Negara

Panjang Ruas (KM)	JKP (KM)	JAP (KM)
1.448,81	657,81	791

Sumber data : Dinas PUPR dihitung sekali 5 Tahun (2016 – 2021)

2.3.1.20.2.3 Panjang jalan Provinsi

Panjang (KM)	Keterangan		
	Aspal	Beton / Tanah	Belum Tembus
1.525,17	1.097,45	342,91	84,83

Sumber data : SK Gubernur Sumbar Nomor : 600-903.1-2015 Tgl 18 Desember 2015.

`

2.3.1.20.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.3.1.20.3.1 Rasio rumah layak huni

No	Keterangan			Jumlah
1	Jumlah Rumah (unit)			1.264.097
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni *) (unit)			180.342
3	Jumlah Rumah Layak Huni			1.083.755
4	Jumlah Penanganan RTLH (unit)	TA 2016	BSPS	2.118
			Program Strategis	-
			Rumah Khusus	385
			DAK	196
		TA 2017	BSPS	3.006
			Program Strategis	525
			Rumah Khusus	-
			DAK	1.958
		TA 2018	BSPS	5.700
			Program Strategis	2.345
			Rumah Khusus	-
			DAK	1.944
		Total Penanganan		18.177
5	Sisa RTLH (unit)			162.165
6	Persentase Penanganan			10%

Sumber: Dinas Perkimtan Prov. Sumatera Barat

2.3.1.20.3.2 Kawasan Kumuh

NO	Jumlah Kawasan	Luas Kawasan Permukiman(Ha)	Luas Kawasan Kumuh	% Kawasan Kumuh
1	248	148.496,84	7.573,49	5,10

Sumber: Dinas Perkimtan Prov. Sumatera Barat

2.3.1.20.4 Pertanahan

Menggambarkan tertib administrasi sebagai kepastian didalam kepemilikan lahan, semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

No.	Keterangan		Jumlah
1	Luas Wilayah (Ha)		4.229.730
2	Jumlah Semua (Budidaya)	Bidang (±)	3.649.657
3		Luas (Ha) (±)	2.286.912
4	Jumlah Tanah Terdaftar	Bidang	801.171
5		%	
6		Luas (Ha)	775.617,56
7		%	33,92
8	Tanah Belum Terdaftar	Bidang	2.848.486
9		Luas (Ha)	1.513.806
10		%	66,19

Sumber: Dinas Perkimtan Prov. Sumatera Barat

`

2.3.1.20.5 Pangan

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA BERAS								
1	Menurut Produksi	Ton	1 395 819	1 384 570	12 229 747	1 495 356	1 512 955	1 512 955
2	Ketersediaan Beras	Kg/kap/th	275,5	269,8	236,66	284,31	284,64	284,64
3	Konsumsi Beras	Kg/kap/th	105,16	107,70	105,70	118,1	109,70	108,00
4	Kebutuhan Beras	Ton	532 775	552 706	549 248	555 932	583 767	583 767
5	Surplus/Defisit	Ton	863 044	831 864	680 500	939 424	929 188	929 188
6	Ketersediaan Energi Beras	Kkal/kap/hr	2 734	2 677	2 348	2 821	2 824	2 824
7	Total Energi Ideal kelompok bahan makanan sesuai PPH Ketersediaan	%	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
8	Persentase Angka Kecukupan Energi beras pd tkt. ketersediaan	%	241,60	147,20	147,4	162	162	162

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2 Kualitas

2.3.2.1 Kesehatan

2.3.2.1.1 Angka Harapan Hidup

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Harapan Hidup (Metode Baru)	68.32	68.66	68.73	68.78	69.01

Sumber : Data BPS Prov. Sumbar

2.3.2.1.2 Kelahiran

2.3.2.1.2.1 Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)

No	Indikator	2016	2017	2018
1	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (SFR)	NA	NA	NA

2.3.2.1.2.2 Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Indikator	2016	2017	2018
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	NA	NA	NA

`

2.3.2.1.3 Rasio Anak dan Perempuan (CWR)

2016			2017			2018		
Penduduk Usia 0 - 4 Tahun	penduduk Perempuan usia 15-49 tahun	CWR	Penduduk Usia 0 - 4 Tahun	penduduk Perempuan usia 15-49 tahun	CWR	Penduduk Usia 0 - 4 Tahun	penduduk Perempuan usia 15-49 tahun	CWR
353,490	1,452,618	24.33	338,228	1,475,130	22.93	374,616	1,451,425	25.81

Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

2.3.2.1.4 Kematian

2.3.2.1.4.1 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Merupakan besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun setiap 1000 kelahiran hidup.

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Bayi	14.44	14.02	12.33

Sumber data: Profil Kesehatan Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan suatu penurunan terhadap angka kematian bayi pertahunnya.

2.3.2.1.4.2 Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

Merupakan besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia 28 hari, dinyatakan dengan perseribu kelahiran hidup.

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Neonatal	7.14	6.58	5.79

Sumber data: Profil Kesehatan Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pertahunnya terhadap angka kematian bayi baru lahir.

2.3.2.1.4.3 Angka Kematian Post Neonatal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

Merupakan Kematian bayi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Post Neonatal	7.30	7.43	6.54

Sumber data: Profil Kesehatan Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)

Tabel diatas menjelaskan bahwa kematian bayi baru lahir mengalami fluktuatif pertahunnya.

`

2.3.2.1.4.4 Angka Kematian Anak

Merupakan Suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun.

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Anak		0.48	0.43

Sumber data: Profil Kesehatan Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)

Tabel ditas menunjukkan bahwa angka kematian bayi yang berusia 0-4 tahun menurun dari tahun 2016 ke tahun 2017

2.3.2.1.4.5 Angka Kematian Balita

Merupakan Suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun dibagi 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Balita		2.40	2.87

Sumber data: Profil Kesehatan Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)

Kematian balita dilihat dari tabel diatas mengalami peningkatan per tahunnya.

2.3.2.1.4.6 Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera per 100.000 kelahiran hidup dalam 1 tahun.

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Angka Kematian Post Neonatal	115.39	113.62	120.70

Sumber data: Profil Kesehatan Sumatera Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan tabel diatas angka kematian ibu pertahunnya mengalami angka fluktuatif.

`

2.3.2.1.4.7 Rasio Kesehatan

NO	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 72	1 : 73	1 : 74	1 : 52	1 : 52	1 : 52
2	Rasio Puskesmas, poliklinik,pustu per satuan penduduk	1:19.411	1:19.587	1:19.628	1:20.689	1:20.689	1:20.689
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:73.313	1:72.280	1:73.187	1:74.823	1 : 73.910	1 : 73.910
4	Rasio dokter per satuan penduduk	1:4.119	1:4.582	1:4.348	1:5.267	1 : 6.676	1 : 6.676
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:2.118	1:2.790	1:2.759	1:2.028	1 : 3.503	1 : 3.503

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.1.4.8 Cakupan Kesehatan

NO	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%)	71,50	74,74	75,73	73,23	68,00	68*)
2	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	89,00	90,02	90,00	81,65	78,15	78,15*)
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %	71,20	77,40	85,0	72,7	81	3,87*)
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif (CDR) (%)	60,97	63,97	65,45	58,6	33,9	8,8
6	Cakupan penemuan kasus baru TB (CNR) (%)	135,48	144,27	144,74	153,04	153,04	2224
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	185	185
8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	37*)
9	Cakupan kunjungan bayi	88,15	93,43	93,45	93,45	85,99	
10	Cakupan puskesmas visitrate	145,81	146,37	147,49	147,49	148,2	
11	Cakupan pembantu puskesmas	719,8	734,9	734,9	312,87	523	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

`

2.3.2.2 Pendidikan

2.3.2.2.1 Angka Melek Huruf

No	Tahun	Jenis Kelamin	Angka Melek Huruf
1	2014	Laki-Laki	99.14
		Perempuan	98.48
		Jumlah	98.80
2	2015	Laki-Laki	99.75
		Perempuan	99.62
		Jumlah	99.69
3	2016	Laki-Laki	99.75
		Perempuan	99.62
		Jumlah	99.69
4	2017	Laki-Laki	98.99
		Perempuan	98.25
		Jumlah	98.71
5	2018	Laki-Laki	98.51
		Perempuan	99.92
		Jumlah	99.79

Sumber Data: sumbar.bps.go.id

2.3.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1	APK SD/MI	112,36	111,01	108,42
2	APK SMP/MTS	101,58	102,99	104,08
3	APK SMA/SMK/MA	83,94	85,52	90,07

Sumber data:

1. APK/APM SD/MI Sederajat Pusdatin Kemdikbud
2. Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri

APK SD/MI cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan APK SMP/MTS dan SMA/SMK/MA mengalmi kenaikan pertahunnya.

2.3.2.2.3 Angka Partisipasi Murni

No	Indikator	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1	APM SD/MI	95,92	95,72	94,84
2	APM SMP/MTS	79,57	79,74	78,49
3	APM SMA/SMK/MA	65,41	66,74	69,04

Sumber data:

1. APK/APM SD/MI Sederajat Pusdatin Kemdikbud
2. Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri

APM SD/MI dan SMP/MTS bersifat fluktuatif. Sedangkan APM SMA/SMK/MA Cenderung naik.

`

2.3.2.2.4 Angka Partisipasi Sekolah

No	Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)	
1	2014	SD	99.27
		SMP	95.84
		SMA	81.97
2	2015	SD	99.44
		SMP	95.98
		SMA	82.53
3	2016	SD	99.43
		SMP	96.17
		SMA	82.62
4	2017	SD	99.48
		SMP	96.25
		SMA	82.59
5	2018	SD	99.51
		SMP	96.37
		SMA	83.08

Sumber data: bps.sumbar.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa APS cenderung naik setiap tahunnya.

2.3.2.2.5 Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,21	0,21	0,22	0,21	0,12	0,27
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,37	0,44	0,46	0,36	0,27	0,67
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,89	0,92	0,95	0,97	1,2	1,14

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.2.6 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,99	97,99	101,3	105,73	100,27	101,24
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,02	99,95	123,83	115,46	98,97	102,88
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	85,39	99,60	123,11	80,41	95,18	98,1

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

`

2.3.2.2.7 Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,53	99,28	183,24	70,4	70,62	105,34
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	99,13	98,49	78,18	105,6	104,02	96,48

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.2.8 Fasilitas Pendidikan

1 No	Kabupaten / Kota	Sarana Pendidikan (unit)						
		SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK
A	**Kabupaten**							
1	Kepulauan Mentawai	117	1	28	4	13	1	3
2	Pesisir Selatan	391	23	76	31	23	16	16
3	Solok	351	10	70	35	22	14	13
4	Sijunjung	208	3	50	13	14	4	10
5	Tanah Datar	305	7	55	49	19	26	8
6	Padang Pariaman	408	9	60	27	25	10	16
7	Agam	448	11	62	58	26	31	14
8	50 Kota	370	8	53	28	16	10	8
9	Pasaman	245	10	38	15	15	12	9
10	Solok Selatan	146	16	38	17	11	8	6
11	Dhamasraya	153	6	36	18	16	14	7
12	Pasaman Barat	263	10	64	60	24	28	18
B	**Kota**							
13	Padang	408	11	96	20	55	13	41
14	Solok	44	2	7	2	6	1	5
15	Sawahlunto	60	4	11	3	4	2	3
16	Padang Panjang	38	2	13	6	7	9	4
17	Bukittinggi	59	2	13	6	11	6	12
18	Payakumbuh	77	3	18	6	11	5	9
19	Pariaman	77	4	12	9	7	3	9
	Total	**4.168**	**142**	**800**	**407**	**325**	**213**	**211**

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka

2.3.2.2.9 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan dasar	59,65	60,1	59,2
2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	29,14	30,97	32,75

Sumber data: SDP2D Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar mengalami fluktuatif sementara itu untuk penduduk usia sekolah pendidikan menengah mengalami kenaikan.

`

2.3.2.2.10 Rasio Guru Murid

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak.

No.	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	0.12	0.09	0.09

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rasio guru terhadap murid pendidikan menengah mengalami penurunan.

2.3.2.2.11 Rasio Murid per Kelas

Definisi Operasional Indikator Perbandingan jumlah murid dengan jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka yang diperoleh merupakan indicator kepadatan kelas pada suatu jenjang pendidikan.

No.	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Rasio Siswa per Kelas	26	27	27

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rasio siswa perkelas mengalami kenaikan.

2.3.2.2.12 Rasio Kelas per Guru

No.	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Rasio Kelas per Guru	0.25	0.38	0.40

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kelas per guru mengalami peningkatan.

2.3.2.2.13 Rasio Guru per Sekolah

Definisi Operasional Indikator Rasio Guru/Tenaga pengajar per Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu.

Kegunaan Indikator Penyajian Untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

No.	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Rasio Guru per Sekolah	32.40	27.13	26.27

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

`

Analisis berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa terjadi penurun terhadap rasio guru persekolah tiap tahunnya.

2.3.2.2.14 Rasio Guru Mata Pelajaran per Sekolah

No	Indikator	2016	2017	2018
1	Rasio Guru Mata Pelajaran per Sekolah	NA	NA	NA

2.3.2.3 Ekonomi

2.3.2.3.1 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tahun			2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	Bekerja		2.061.109	2.180.336	2.184.599	2.347.911	2.344.972
	Pengangguran Terbuka 1	Pernah Bekerja	56.940	51.678	65.154	-	40.861
		Tidak Pernah Bekerja	98.638	99.979	96.410	-	97.842
		Jumlah	155.578	151.657	161.564	125.903	138.703
	Jumlah Angkatan Kerja		2.216.687	2.331.993	2.346.163	2.473.814	2.483.675
Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja			92,98	93,50	93,11	94,91	94,42
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah		364.766	443.014	414.955	360.250	418.369
	Mengurus Rumah Tangga		675.720	618.426	672.483	690.680	692.806
	Lainnya		265.994	183.786	200.635	163.382	151.980
	Jumlah Bukan Angkatan Kerja		1.306.480	1.245.226	1.288.073	1.214.312	1.263.155
Jumlah			3.523.167	3.577.219	3.634.236	3.688.126	3.746.830
Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja			62,92	65,19	64,56	67,08	66,29

Sumber data: bps.sumbarprov.go.id

2.3.2.3.2 Pengangguran Terbuka

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengangguran Terbuka	6.97	6.18	6.89	5.09	5.58

Sumber data: sumbar.bps.go.id

2.3.2.3.3 Indeks Williamson

NO	Indikator	2016	2017	2018
1	Indeks Williamson	0,259	0,258	0,258

Sumber data: sumbar.bps.go.id

2.3.2.3.4 Pertumbuhan PDRB

NO	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan PDRB	5.88	5.53	5.27	5.29	5.14

Sumber data: sumbar.bps.go.id

`

2.3.2.4 Sosial

2.3.2.4.1 Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

No	Kab / Kota	JUMLAH PESERTA JKSS			TERINDIKASI GANDA	
		PESERTA AWAL	PESERTA ADDENDUM I	PESERTA ADDENDUM II	REKON I	REKON II
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab Solok Selatan Jan s/d April	43.835	39.803	39.803	4.032	-
2	Kab Dharmasraya Jan s/d April	23.007	22.775	21.919	232	856
3	Kab Padang Pariaman Jan s/d April	20.962	20.962	20.962	-	-
4	Kab Sijunjung Jan s/d April	14.095	13.733	13.572	362	161
5	Kab Pasaman Jan s/d April	65.603	65.603	65.479	-	124
6	Kab Pesisir Selatan Jan s/d Des	26.881	26.856	26.516	25	340
7	Kab Tanah Datar Jan s/d April	62.279	62.279	62.279	-	-
8	Kab Pasaman Barat Jan s/d Feb	24.213	24.213	23.361	-	852
9	Kab 50 Kota Jan s/d Feb	19.545	19.545	19.545	-	-
10	Kab Agam Jan	114.273	107.365	106.443	6.908	922
11	Kab Solok Jan s/d April	27.897	27.054	26.263	843	791
12	Kota Padang Jan s/d Maret	77.089	77.089	73.697	-	3.392
13	Kota Padang Panjang Jan s/d April	3.851	3.851	3.851	-	-
14	Kota Sawahlunto Jan s/d April	13.003	13.003	13.003	-	-
15	Kota Bukittinggi Jan s/d Des	9.884	9.532	9.532	352	-
16	Kota Solok Jan s/d April	11.432	11.432	11.432	-	-
17	Kota Payakumbuh Jan s/d Febr	33.077	33.077	33.077	-	-
18	Kota Pariaman Jan s/d April	9.215	9.215	9.038	-	177
19	Kab Mentawai Jan s/d Des	46.672	34.191	32.629	12.481	1.562
	Jumlah	646.813	621.578	612.401	25.235	9.177

Sumber data: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

2.3.2.4.2 Persentase Penduduk Miskin

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Penduduk Miskin	6.89	7.31	7.09	6.87	6.65

Sumber data: sumbar.bps.go.id

2.3.2.4.3 Bidang Lain

2.3.2.4.4 Umum

2.3.2.4.5 Ketentaraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Konflik Sosial	5	4	3	2
2	Angka Kriminalitas	12.905	12.464	11.689	10.695
3	Jumlah konflik SARA	0	0	0	0
4	Indeks Demokrasi Indonesia	65,81	54,41	69,50	67,06

Sumber Data: Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat

`

No	Indikator	Tahun				Satuan
		2015	2016	2017	2018	
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	5	5	6,65	5,85	PP/10.000 pdk
2	Jumlah Polisi Pamong Praja	2.509	2.640	3.413	3.231	Personil
3	Cakupan patroli Petugas Satpol PP	100	100	100	100	%
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman di Provinsi	96	96	96	96	%
5	Rasio Jumlah Anggota Satlinmas per Jumlah 10.000 Penduduk	N/A	25,59	19,83	19,83	Linmas/10.000 pdk
6	Jumlah Anggota Satlinmas	15.789	12.374	10.179	10.179	Orang
7	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	N/A	0,8	0,9	0,9	Pos Siskamling/desa
8	Jumlah Pos Siskamling Sumatera Barat		1.095	1.112	1.112	Jumlah

Sumber data: Satpol PP Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4.6 Lingkungan Hidup

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,18	76,67	76,7
2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	64,23	67,5	67,5
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,9	89,97	88,37
4	Indeks Kualitas Air (IKA)	65,4	75,69	77,29

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari tabel 2.3.2.4.7, secara umum dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2016, kecenderungan kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat adalah membaik dari tahun ke tahun. Angka-angka indeks capaian pada tabel ini merupakan perhitungan IKLH Provinsi, bukan merupakan hasil perhitungan KLHK. Terdapat perbedaan hasil perhitungan antara perhitungan Provinsi dengan perhitungan KLHK disebabkan antara lain perbedaan sungai yang diukur kualitas airnya (perbedaan kewenangan). Perbandingan angka capaian IKLH antar provinsi untuk komponen yang menjadi kewenangan provinsi tidak dapat dilakukan disebabkan keterbatasan data yang ada. Namun demikian, Jika merujuk pada data indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat yang diukur oleh KLHK (terakhir dirilis untuk IKLH tahun 2017), Provinsi Sumatera Barat dengan nilai IKLH sebesar 68,16 menduduki peringkat 22 dari 34 provinsi Se Indonesia dan peringkat 7 dari keseluruhan 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

`

2.3.2.4.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1.139	1.139	1.139	1.139	1.357
2	Persentase LSM aktif	341	341	-	-	-
3	LPM Berprestasi	3	3	3	0	3
4	PKK aktif	1.338	1.338	1.338	1.367	1.357
5	Posyandu aktif	93,79	95,59	96,80	98,42	96,26
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	113,98	115,28	Program PNPN telah berakhir	Program PNPN telah berakhir	Program PNPN telah berakhir
7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	3.796	3.796	Program PNPN telah berakhir	Program PNPN telah berakhir	Program PNPN telah berakhir

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.4.8 Perhubungan

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perhubungan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	8 845 048	6 456 885	5 711 611	5 711 611	5,463,186	5,297,570
2	Rasio Izin Trayek	%	0,000105	0,000107	0,000106	0,000106	0,0000104	0,0000103
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	2 398	1 952	1 187	632	-	-
4	Jumlah pelabuhan							
	- Pelabuhan Penyeberangan Lintas Padang Mentawai	Pel, Penyeb	4	4	4	4	4	4
	- Udara	Bandara	3	3	4	4	4	4
	- Terminal Bis	Terminal	11	11	11	11	11	11
5	Angkutan Darat	%	0,000023	0,000025	0,000027	0,000027	0,000029	0,00003
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	15,75	15,75	21,01	16,75	-	-
7	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Unit	64 045	64 045	65 924	69 690	68884	72499
8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	35	35	35	35	-	-
9	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor							
	a. Mobil Bus Barang dan Kendaraan Khusus							

`

	- Roda 4	Rupiah	113.000	113.000	163.000	163.000	-	-
	- Roda 6	Rupiah	116.000	116.000	165.000	165.000	-	-
No	**Indikator**	**Satuan**	**Tahun**					
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	b. Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan/ Tempelan	Rupiah	103.000	103.000	153.000	153.000	-	-
10	Pemasangan rambu-rambu	%	14,03	15,86	28,91	28,91	32,12	34,41
		Buah	600	678	756	756	834	873

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4.9 Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Tahun		Satuan
		2017	2018	
1	Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi/peringkat nasional	64,18	82,17	Indeks

Sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4.10 Pemuda dan Olahraga

2.3.2.4.10.1 Cakupan pembinaan olahraga

No	Tahun	Cakupan Pembinaan Olahraga			
		PPLP	KONI		
1	2014	12 Cabang Olahraga Pelajar Se Sumatera Barat	Atlet Andalan : 31	Atlet Prioritas : 27	Atlet Potensial : 76
2	2015	12 Cabang Olahraga Pelajar Se Sumatera Barat	Atlet Andalan : 41	Atlet Prioritas : 55	Atlet Potensial : 68
3	2016	12 Cabang Olahraga Pelajar Se Sumatera Barat	Atlet Andalan : 9	Atlet Prioritas : 297	Atlet Potensial : 0
4	2017	12 Cabang Olahraga Pelajar Se Sumatera Barat	Atlet Andalan : 14	Atlet Prioritas : 14	Atlet Potensial : 34
5	2018	12 Cabang Olahraga Pelajar Se Sumatera Barat	Atlet Andalan : 22	Atlet Prioritas : 91	Atlet Potensial : 23

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4.10.2 Cakupan pelatih yang bersertifikasi

No	Tahun	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi			
		Sertifikasi Nasional dan Internasional	KONI		
1	2014	31 Orang Bersertifikasi Nasional dan Internasional	Pelatih Andalan : 12	Pelatih Prioritas : 10	Pelatih Potensial : 7
2	2015	31 Orang Bersertifikasi Nasional dan Internasional	Pelatih Andalan : 13	Pelatih Prioritas : 17	Pelatih Potensial : 19
3	2016	31 Orang Bersertifikasi Nasional dan Internasional	Pelatih Andalan : 2	Pelatih Prioritas : 6	Pelatih Potensial : 5
4	2017	31 Orang Bersertifikasi Nasional dan Internasional	Pelatih Andalan : 6	Pelatih Prioritas : 2	Pelatih Potensial : 10
5	2018	31 Orang Bersertifikasi Nasional dan Internasional	Pelatih Andalan : 14	Pelatih Prioritas : 22	Pelatih Potensial : 2

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

`

2.3.2.4.10.3 Jumlah atlet berprestasi

No	Tahun	Jumlah Atlit yang Berprestasi	
		Kejurnas Antar PPLP/ D dan SKO Se Indonesia	Kejuaraan Nasional dan Internasional
1	2014	78 Atlit	ASIAN GAME 4 Atlit, TIM NAS U- 19 1 Atlit & AsEAN SCHOL 1 Atlit
2	2015	79 Atlit	Sea Game 2 Atlit dan AsEAN SCHOL 4 Atlit
3	2016	68 Atlit	PON 39 Atlit, AsIAN GAME 2 Atlit, TIM NAS U- 19 2 Atlit dan AsEAN SCHOL 3 atlit
4	2017	59 Atlit	Sea Game 2 Atlit, TIM NAS U- 19 1 Atlit dan TIM NAS U- 16 1 atlit
5	2018	60 Atlit	AsIAN GAME 2 Atlit, TIM NAS U- 19 1 Atlit dan ASEAN SCHOL 1 Atlit

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4.10.4 Lainnya

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Gedung Olahraga Provinsi	8	8	8	8	8	Unit
2	Jumlah Organisasi Pemuda	151	151	150	154	154	Organisasi
3	Jumlah organisasi pemuda terdaftar di Kesbangpol	88	88	88	88	88	Organisasi
4	Jumlah organisasi pemuda terdaftar di KNPI	63	63	62	66	66	Organisasi
5	Jumlah Organisasi Olahraga	58	58	60	59	59	Organisasi
6	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3	Unit
7	Lapangan Olahraga	34	34	34	34	34	Unit
8	Cabang olahraga yang dibina Dispora Melalui UPTD KBOR (PPLP/SKO)	12	12	12	12	12	Cabang Olahraga

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4.11 Kebudayaan

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	32	37	72	72	20	19
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	8	8	8	8	3	3
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	90,45	90,45	99,54	99,54	99,54	NA
		Buah	587	587	646	646	646	646

Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

`

2.3.2.4.12 Perpustakaan

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Perpustakaan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	54,819	64,220	86,169	103,463	127,220
2	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	201,391	211,848	225,759	241,061	253,697
3	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	48,648	47,957	47,679	48,158	50,739
4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	48,836	50,689	53,582	56,964	58,802
5	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Dimiliki Sertifikasi	2	2	2	4	4

2.3.2.4.13 Koperasi

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase koperasi aktif	69,03	69,96	71,44	77,32	77,68

Sumber data: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.4.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator Pembangunan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,19	48,85	48,85	49,90	48,85	NA
2	Rasio KDRT	%	0,60	0,82	0,91	0,96	0,28	NA
3	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	1,69	0,01	0,01	NA	NA	NA
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	56,01	50,65	50,65	50,65	55,04	NA
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	1261	1312	1341	48	521	NA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

2.3.2.4.15 Lainnya

2.3.2.4.15.1 Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)	69.36	69.98	70.73	71.21	71.73

Sumber data: BPS Provinsi Sumatera Barat

Dalam 5 tahun terakhir, IPM Sumatera Barat naik sebesar 2,37%. Namun tingkat IPM Sumatera Barat masih harus ditingkatkan

`

2.3.2.4.15.2 Gini Ratio

Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (Maret) Tahun 2013-2018

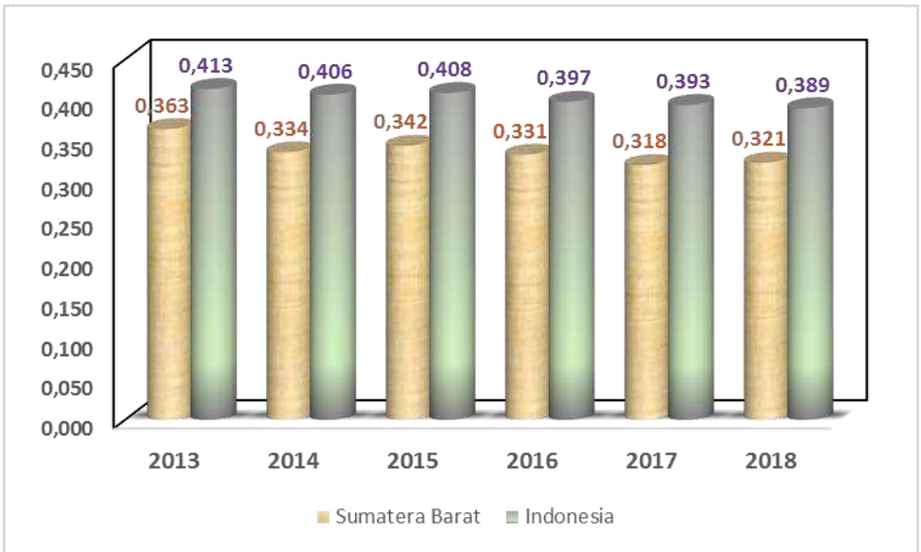

II.1 Sumber : Berita Resmi Statistik No. 58/07/13/Th. XXI, 16 Juli 2018

Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah (Maret) Tahun 2013 – September 2018

Tahun	Pedesaan		Perkotaan		Pedesaan + Perkotaan	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
2013	0,309	0,288	0,397	0,383	0,363	0,351
2014	0,295	0,280	0,338	0,354	0,334	0,332
2015	0,304	0,280	0,358	0,325	0,342	0,319
2016	0,288	0,267	0,353	0,323	0,331	0,312
2017	0,276	0,288	0,336	0,312	0,318	0,309
2018	0,280	0,262	0,338	0,308	0,321	0,305

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 06/01/13/Th. XXII, 15 Januari 2019

2.3.2.4.15.3 Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia

Tahun	40% berpengeluaran rendah	40% berpengeluaran sedang	20% berpengeluaran tinggi
2015	20,50	36,18	43,33
2016	20,82	36,86	42,32
2017	21,31	37,59	41,10
2018	20,50	37,85	41,65

Sumber : World Bank

2.3.2.4.15.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat

Daerah	Susenas	Kelompok Pendudu ɛ

`

		40% Pengeluaran Rendah	40% Pengeluaran Menengah	40% Pengeluaran Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	Sept 2017	21,31	38,95	39,74
	Maret 2018	19,99	37,89	42,12
	Sept 2018	21,01	39,84	39,15
Perdesaan	Sept 2017	22,79	38,85	38,35
	Maret 2018	23,00	39,30	37,70
	Sept 2018	24,20	39,19	36,61
Perkotaan dan Perdesaan	Sept 2017	21,46	38,25	40,30
	Maret 2018	21,06	37,78	41,17
	Sept 2018	21,66	38,69	39,64

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 06/01/13/Th. XXII, 15 Januari 2019

2.3.3 Mobilitas

2.3.3.1 Mobilitas Permanen

2.3.3.1.1 Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Neto

No	Kabupaten/Kota	2017				2018			
		Jumlah Penduduk (Jiwa)			Angka Migrasi Neto	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Angka Migrasi Neto
		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar		Pada Pertengahan Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	
1	Kabupaten Pesisir Selatan	518.121	68.664	49.512	36,96	514.107	30.184	9.008	41,19
2	Kabupaten Solok	375.984	2.728	7.270	-12,08	380.692	1.616	4.181	-6,74
3	Kabupaten Sijunjung	233.832	3.982	5.812	-7,83	235.913	2.464	3.373	-3,85
4	Kabupaten Tanah Datar	366.397	5.398	7.191	-4,89	369.374	5.398	7.757	-6,39
5	Kabupaten Padang Pariaman	462.651	7.780	12.316	-9,8	446.240	8.973	12.714	-8,38
6	Kabupaten Agam	525.088	13.341	15.606	-4,31	527.730	8.394	10.428	-3,85
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	374.214	3.984	4.840	-2,29	377.826	3.984	4.840	-2,27
8	Kabupaten Pasaman	315.575	19.081	19.477	-1,25	317.500	3.444	5.049	-5,06
9	Kabupaten Kep. Mentawai	84.468	842	376	5,52	86.593	1.035	376	7,61
10	Kabupaten Dharmasraya	206.016	2.093	7.342	-25,48	210.268	3.934	4.277	-1,63
11	Kabupaten Solok Selatan	177.809	1.593	2.171	-3,25	179.796	5.049	4.913	0,76
12	Kabupaten Pasaman Barat	428.631	11.675	4.272	17,27	430.740	4.640	3.336	3,03
13	Kota Padang	884.402	9.316	10.183	-0,98	894.299	5.522	6.278	-0,85
14	Kota Solok	69.833	1.526	1.659	-1,9	72.669	1.993	1.905	1,21
15	Kota Sawahlunto	64.574	1.270	1.310	-0,62	65.710	1.341	1.227	1,73
16	Kota Padang Panjang	54.749	1.305	1.342	-0,68	57.165	1.956	1.463	8,62
17	Kota Bukittinggi	117.411	1.861	2.906	-8,9	120.387	3.546	2.994	4,59
18	Kota Payakumbuh	132.286	2.804	2.700	0,79	136.501	1.803	1.539	1,93
19	Kota Pariaman	89.722	2.229	2.331	-1,14	91.743	2.442	2.634	-2,09

2.3.3.1.2 Migrasi Seumur Hidup

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Migran Masuk Seumur Hidup Antar Provinsi	N/A	N/A	313.767	335.251	N/A

`

2	Migran Keluar Seumur Hidup Antar Provinsi	N/A	N/A	1.091.810	1.058.948	N/A
3	Migran Neto Seumur Hidup Antar Provinsi	N/A	N/A	778.044	723.697	N/A

Sumber data: Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2017 (BPS)

2.3.3.1.3 Migrasi Risen

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Migran Masuk Risen Antar Provinsi	N/A	N/A	111.230	116.007	N/A
2	Migran Keluar Risen Antar Provinsi	N/A	N/A	115.432	160.540	N/A
3	Migran Neto Risen Antar Provinsi	N/A	N/A	-4.202	-44.532	N/A

Sumber data: Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2017 (BPS)

2.3.3.1.4 Persentase Migrasi dari Perdesaan ke Perkotaan

2.3.3.1.5 Transmigrasi

2.3.3.1.5.1 Transmigran Berdasarkan Penempatan Transmigrasi

Penempatan Transmigrasi					
Menurut Daerah Asal		Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)		Pola Transmigrasi PIR/PIR BUN dan PIR SUS	
KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
191	715				-

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

2.3.3.1.5.2 Transmigran Berdasarkan Jenis Transmigrasi

Jenis Transmigrasi					
Swakarsa Berbantuan		Swakarsa Mandiri		Transmigrasi Umum	
Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
-	-	-	-	357	356

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

2.3.3.1.5.3 Transmigran Berdasarkan Pola Transmigrasi

No.	Pola Transmigrasi	Laki-laki	Perempuan
1	Pertanian Tanaman Pangan	357	356
2	Perkebunan	-	-
3	Peternakan	-	-
4	Perikanan	-	-
5	Jasa Industri	-	-
6	Hutan Tanaman Industri (HTI)	-	-

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Secara umum pola transmigrasi yang dipakai di Sumatera Barat yakni pertanian tanaman pangan.

`

2.3.3.1.6 Pemukiman Kembali

2.3.3.2 Mobilitas Non Permanen

2.3.3.2.1 Pekerja Komuter

No	Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin	Tahun		Tahun		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Perkotaan	Laki - Laki	N/A	N/A	29.734	39.600	N/A
		Perempuan	N/A	N/A	18.290	18.502	N/A
		Absolut	N/A	N/A	48.024	58.102	N/A
		%	N/A	N/A	66,86	56,01	N/A
2	Perdesaan	Laki - Laki	N/A	N/A	15.385	33.909	N/A
		Perempuan	N/A	N/A	8.422	11.727	N/A
		Absolut	N/A	N/A	23.807	45.636	N/A
		%	N/A	N/A	33,14	43,99	N/A
3	Perkotaan + Perdesaan	Laki - Laki	N/A	N/A	45.119	73.509	N/A
		Perempuan	N/A	N/A	26.712	30.229	N/A
		Absolut	N/A	N/A	71.831	103.738	N/A
		%	N/A	N/A	100	100	N/A

Sumber data: Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2017 (BPS)

2.3.3.2.2 Pekerja Sirkuler

No	Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin	Tahun		Tahun		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Perkotaan	Laki - Laki	N/A	N/A	15.265	11.828	N/A
		Perempuan	N/A	N/A	272	-	N/A
		Absolut	N/A	N/A	15.537	11.828	N/A
		%	N/A	N/A	54,29	42,16	N/A
2	Perdesaan	Laki - Laki	N/A	N/A	12.643	16.224	N/A
		Perempuan	N/A	N/A	440	-	N/A
		Absolut	N/A	N/A	13.083	16.244	N/A
		%	N/A	N/A	45,71	57,84	N/A
3	Perkotaan + Perdesaan	Laki - Laki	N/A	N/A	27.908	28.052	N/A
		Perempuan	N/A	N/A	712	-	N/A
		Absolut	N/A	N/A	28.620	28.052	N/A
		%	N/A	N/A	100	100	N/A

Sumber data: Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2017 (BPS)

2.3.3.2.3 Urbanisasi

2.3.3.2.4 Rasio Penduduk Kota dan Desa

No	Keterangan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Perkotaan	1.008.528	997.873	2.006.401

`

2	% Penduduk Perkotaan	36,24	36,46	36,35
3	Penduduk Perdesaan	1.774.048	1.738.796	3.512.844
4	% Penduduk Perdesaan	63,76	63,54	63,65
5	Jumlah Penduduk	2.782.576	2.736.669	5.519.245

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

2.3.4 Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dibagi dalam 2 tipe yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti (nuclear family) yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak anak yang belum kawin atau ibu dengan anak anak yang belum kawin. Sedangkan keluarga luas (extended family) yaitu keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, anak anak baik yang sudah kawin ataupun belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

2.3.4.1 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

No	Keterangan		2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk	Laki-laki	2.758.043	2.789.477	2.782.576
		Perempuan	2.694.231	2.721.769	2.736.669
		Total	5.452.274	5.511.246	5.519.245
2	Jumlah Kepala Keluarga	Laki-laki	1.223.858	1.238.821	1.246.094
		Perempuan	231.264	242.831	258.907
		Total	1.455.122	1.481.652	1.505.001
3	Rata-rata Keluarga		3,75	3,72	3,67

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk Sumatera Barat yakni sebesar 3,67 atau sekitar 3 – 4 orang per keluarga. Kepala keluarga masih didominasi penduduk laki-laki, namun kepala keluarga perempuan jumlahnya juga cukup besar dan mengalami kenaikan dari tahun 2016 ke tahun 2018.

`

2.3.4.2 Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga

No	Status Hubungan Dalam Keluarga	2016			2017			2018		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total
1	Kepala Keluarga	1.223.858	231.264	1.455.122	1.238.821	242.831	1.481.652	1.246.097	258.907	1.505.004
2	Suami	248	-	248	215	-	215	166	-	166
3	Istri	-	1.157.120	1.157.120	-	1.169.753	1.169.753	-	1.174.244	1.174.244
4	Anak	1.445.933	1.193.422	2.639.355	1.461.835	1.200.728	2.662.563	1.455.099	1.204.937	2.660.036
5	Menantu	854	328	1.182	710	276	986	421	180	601
6	Cucu	18.547	15.509	34.056	18.483	15.191	33.674	17.631	14.530	32.161
7	Orang Tua	2.474	19.203	21.677	2.132	17.002	19.134	1.739	14.440	16.179
8	Mertua	5.127	39.425	44.552	4.607	37.077	41.684	4.119	33.018	37.137
9	Famili Lain	56.147	34.088	90.235	57.599	34.793	92.392	49.478	30.434	79.912
10	Pembantu	92	228	320	95	238	333	57	132	189
11	Lainnya	4.763	3.644	8.407	4.980	3.880	8.860	7.769	5.847	13.616

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

2.3.4.3 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Umur

No	Kelompok Umur	2016			2017			2018		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total
1	00-04	1	0	1	1	0	1	2	0	2
2	05-09	0	0	0	5	1	6	2	0	2
3	10-14	12	12	24	14	9	23	3	5	8
4	15-19	544	483	1.027	587	571	1.158	719	525	1.244
5	20-24	14.131	3.589	17.720	14.626	3.922	18.548	15.710	3.558	19.268
6	25-29	69.206	6.811	76.017	68.980	7.530	76.510	70.296	6.974	77.270
7	30-34	154.030	9.892	163.922	149.044	10.723	159.767	145.002	10.473	155.475
8	35-39	172.585	11.839	184.424	180.054	13.084	193.138	177.162	13.510	190.672
9	40-44	171.209	16.189	187.398	172.514	16.678	189.192	170.503	17.313	187.816
10	45-49	147.448	19.302	166.750	156.023	20.625	176.648	154.500	21.577	176.077
11	50-54	135.579	25.369	160.948	132.817	25.431	158.248	134.868	27.175	162.043
12	55-59	119.758	30.446	150.204	121.614	31.032	152.646	118.324	31.968	150.292
13	60-64	98.375	32.621	130.996	98.404	33.423	131.827	103.221	36.974	140.195
14	65-69	57.294	23.641	80.935	64.270	26.529	90.799	70.292	30.467	100.759
15	70-74	38.678	21.571	60.249	33.808	20.453	54.261	35.368	21.965	57.333
16	> 75	45.008	29.499	74.507	46.060	32.820	78.880	50.125	36.423	86.548
	Total	1.223.858	231.264	1.455.122	1.238.821	242.831	1.481.652	1.246.097	258.907	1.505.004

2.3.4.4 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

No	Keterangan	2016	2017	2018
1	Kepala Keluarga Laki-laki	1.223.858	1.238.821	1.246.094
2	% Kepala Keluarga Laki – laki	84,11	83,61	82,80
3	Kepala Keluarga Perempuan	231.264	242.831	258.907
4	% Kepala Keluarga Perempuan	15,89	16,39	17,20
5	Total	1.455.122	1.481.652	1.505.001

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

`

2.3.4.5 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	2016	2017	2018
1	Tidak/ Belum Sekolah	Laki - laki	34.978	37.310	38.374
		Perempuan	15.020	16.182	16.885
		Jumlah	49.998	53.492	55.259
2	Belum Tamat SD	Laki - laki	100.068	102.659	104.382
		Perempuan	34.034	36.569	38.131
		Jumlah	134.102	139.228	142.513
3	Tamat SD/ Sederajat	Laki - laki	374.272	367.183	357.982
		Perempuan	94.313	95.903	100.978
		Jumlah	468.585	463.086	458.960
4	SLTP/ Sederajat	Laki - laki	234.725	236.465	234.629
		Perempuan	31.897	33.648	36.406
		Jumlah	266.622	270.113	271.035
5	SLTA/ Sederajat	Laki - laki	366.376	376.451	384.781
		Perempuan	41.587	44.703	48.693
		Jumlah	407.963	421.154	433.474
6	DI/DII	Laki - laki	9.368	9.150	8.887
		Perempuan	2.931	3.046	3.257
		Jumlah	12.299	12.196	12.144
7	DIII/ Akademi	Laki - laki	23.177	23.890	24.988
		Perempuan	3.633	3.905	4.338
		Jumlah	26.810	27.795	29.326
8	DIV/S1	Laki - laki	72.482	76.939	82.744
		Perempuan	7.244	8.233	9.447
		Jumlah	79.726	85.172	92.191
9	S2	Laki - laki	7.623	7.964	8.499
		Perempuan	525	560	682
		Jumlah	8.148	8.524	9.181
10	S3	Laki - laki	789	810	828
		Perempuan	80	82	90
		Jumlah	869	892	918
11	Jumlah	Laki - laki	1.223.858	1.238.821	1.246.094
		Perempuan	231.264	242.831	258.907
		Jumlah	1.455.122	1.481.652	1.505.001

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

2.3.4.6 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Kawin

No	Status Kawin	Jenis Kelamin	2016	2017	2018
1	Belum Kawin	Laki-Laki	18.816	21.530	19.337
		Perempuan	10.681	12.249	10.383
		Jumlah	29.497	33.779	29.720
2	Kawin	Laki-Laki	1.175.945	1.186.202	1.192.216
		Perempuan	41.619	46.727	52.026
		Jumlah	1.217.564	1.232.929	1.244.242
3	Cerai Hidup	Laki-Laki	8.860	10.429	11.806
		Perempuan	36.460	38.400	40.445
		Jumlah	45.320	48.829	52.251
4	Cerai Mati	Laki-Laki	20.237	20.660	22.735
		Perempuan	142.504	145.455	156.053
		Jumlah	162.741	166.115	178.788
5	Jumlah Kepala Keluarga	Laki-Laki	1.223.858	1.238.821	1.246.094

`

No	Status Kawin	Jenis Kelamin	2016	2017	2018
		Perempuan	231.264	242.831	258.907
		Jumlah	1.455.122	1.481.652	1.505.001

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

2.3.4.7 Karakteristik Kepala Keluarga Menurut Status Bekerja

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggotanya serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Status pekerjaan kepala keluarga diperlukan untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

No	Tahun	Jenis Kelamin		Bekerja	Belum/ Tidak Bekerja	Pelajar/ mahasiswa	Pensiunan	Mengurus Rumah Tangga	Total
1	2016	Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah	1.175.583	18.157	3.383	26.326	409	1.223.858
			%	96,06	1,48	0,28	2,15	0,03	100
		Perempuan (Jiwa)	Jumlah	70.227	8.980	2.870	6.858	142329	231.264
			%	30,37	3,88	1,24	2,97	61,54	100
		Total	Jumlah	1.245.810	27.137	6.253	33.184	142738	1.455.122
			%	85,62	1,86	0,43	2,28	9,81	100
2	2017	Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah	1.193.156	16.751	3.839	24.691	384	1.238.821
			%	96,31	1,35	0,31	1,99	0,03	100,00
		Perempuan (Jiwa)	Jumlah	71.506	9.440	3.324	6.581	151980	242.831
			%	29,45	3,89	1,37	2,71	62,59	100,00
		Total	Jumlah	1.264.662	26.191	7.163	31.272	152364	1.481.652
			%	85,35	1,77	0,48	2,11	10,28	100,00
3	2018	Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah	1.200.472	15.045	3.684	26.697	196	1.246.094
			%	96,34	1,21	0,30	2,14	0,02	100,00
		Perempuan (Jiwa)	Jumlah	71.488	8.701	2.672	7.458	168588	258.907
			%	27,61	3,36	1,03	2,88	65,12	100,00
		Total	Jumlah	1.271.960	23.746	6.356	34.155	168784	1.505.001
			%	84,52	1,58	0,42	2,27	11,21	100,00

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (Diolah)

Sebagian besar penduduk Sumatera Barat mempunyai pekerjaan wiraswasta lalu kemudian merupakan petani/peternak. Namun tidak terdapat data mengenai jenis usaha dari pekerjaan wiraswasta tersebut.

2.3.4.8 Indeks Pembangunan Gender

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pembangunan Gender	94.04	94.74	94.42	94.16	94.17

Sumber data: BPS Provinsi Sumatera Barat

2.3.4.9 Indeks Pemberdayaan Gender

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Pemberdayaan Gender	61.86	62.42	64.51	65.01	65.70

`

Sumber data: BPS Provinsi Sumatera Barat

2.3.5 Kepemilikan Dokumen Kependudukan

2.3.5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki Kartu Keluarga.

No	Keterangan	2017	2018
1	Jumlah KK	1.481.652	1.505.004
2	Kepemilikan KK	1.380.435	1.308.565
3	%	93,17	86,95

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

2.3.5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk eletronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memiliki KTP-el.

No	Keterangan	2.016	2.017	2.018
1	Wajib KTP (Jiwa)	3.843.488	3.913.865	3.872.858
2	Kepemilikan KTP-el (Jiwa)	3.335.224	3.264.545	3.517.258
3	%	86,78	83,41	90,82

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

2.3.5.3 Kepemilikan Akta

2.3.5.3.1 Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Keterangan	2016	2017	2018
1	Anak 0-18 thn	1.810.022	1.819.743	1.858.737
2	Kepemilikan Akta	1.218.621	1.345.975	1.555.967
3	%	67,33	73,97	83,71
4	Belum Memiliki Akta	591.401	473.768	302.770
5	%	32,67	26,03	16,29

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

Tabel diatas menunjukkan penduduk yang memiliki akta kelahiran yang dibandingkan dengan penduduk umur 0 -18 tahun dimana mengalami kenaikan setiap tahunnya.

No	Keterangan	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk	5.452.274	5.511.246	5.519.245
2	Kepemilikan Akta (Jiwa)	1.218.621	1.877.213	2.241.075
3	%	22,35	34,06	40,60

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

`

2.3.5.3.2 Kepemilikan Akta Perkawinan

No	Keterangan	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Status Kawin (Jiwa)	2.433.839	2.444.495
2	Kepemilikan Akta Perkawinan (Jiwa)	498.477	644.051
3	%	20,48	26,35

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

2.3.5.3.3 Kepemilikan Akta Perceraian

NO	Keterangan	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Status Cerai Hidup (Jiwa)	62.670	64.070
2	Kepemilikan Akta Perceraian (Jiwa)	9.120	12.820
3	%	14,55	20,01

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)

2.3.5.3.4 Kepemilikan Akta Kematian

No	Keterangan	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Meninggal (Jiwa)	52.076	33.418
2	Kepemilikan Akta Kematian (Jiwa)	29.506	20.877
3	%	56,66	62,47

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih Dukcapil Kemendagri (diolah)